



IRPIA

VOLUME 8 NOMOR 6; JULI - SEPTEMBER 2023

Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan

PENERBIT:

Institut Riset dan Pengembangan Indonesia

2023

ejournal.irpia.or.id

DAFTAR ISI

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANGKALAN

Intan Nurmalasari Ahmad, Dr. Lukman Arif, M. Si1-15

KUALITAS PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALU LAYANAN DRIVE THRU PADA SISTEM MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KATANG KABUPATEN KEDIRI

Ahmad Farkhan Bahari Ilymy, Dr. Diana Hertati, M.Si16-25

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG TANGGUH SEMERU WANI JOGO SUROBOYO DI RT 06 DAN RT 07 RW 02 KELURAHAN KEPUTIH KOTA SURABAYA

Muhammad Lazuardi Farras Ar Rasyid, Dr. Diana Hertati, M. Si26-38

PEMBERDAYAAN KELOMPOK PETERNAK LEBAH DI KAMPUNG MADU DUSUN PURWOREJO DESA BRINGIN KABUPATEN KEDIRI

Monica Widi Marlan, Drs. Ananta Prathama, M.Si39-46

PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI SEBAGAI ALTERNATIF MENGURANGI PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA

Totok Minto Laksono, Victoria Fitriyanti, Hariani Devita47-55

PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA CHINA

Totok Minto Laksono, Florensia Devina56-67

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANGKALAN

Intan Nurmalasari Ahmad¹, Dr. Lukman Arif, M. Si²
¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat e-mail : intannrmlsr@gmail.com
*Corresponding author : ariflukman208@gmail.com

Abstrak

Histori Artikel

Submitted
20 Juli 2023
Reviewed
21 Juli 2023
Accepted
21 Juli 2023
Published
29 September 2023

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan. Kendala persoalan sampah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara lain: a). Jarak tempuh TPA dengan sumbernya saat ini cukup jauh. b). Sarana dan Prasarana cukup terbatas. c). Biaya operasional pengangkutan cukup tinggi. d). Kolam lindi belum difungsikan. e). Sumur monitoring dan Tanaman sekitar TPA belum difungsikan f). Masyarakat yang memanfaatkan keberadaan TPA. Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Bangkalan harus dilakukan secara periodik dan komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan

Abstract

The purpose of this research is to analyze and describe the evaluation of waste management policies at Buluh TPA in Bangkalan Regency. The Bangkalan Regency Government faces several obstacles in dealing with the waste problem, including: a) The considerable distance between the TPA and its source. b) Limited facilities and infrastructure. c) High operational costs for transportation. d) The leachate pond is not functional. e) Monitoring wells and surrounding vegetation near the TPA are not utilized. f) Communities taking advantage of the presence of the TPA. The evaluation of waste management policies in Bangkalan must be conducted periodically and comprehensively, involving various stakeholders. The evaluation outcomes will serve as the foundation for enhancing policies that are more effective and sustainable in waste management in Bangkalan Regency.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

TPA Buluh, Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu tempat pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Bangkalan. Keberadaan TPA desa Bunajih Kecamatan Labang menjadi kajian Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam bidang lingkungan hidup. Terlebih lagi sumber timbulan sampah semakin meningkat sehingga memerlukan manajemen pengolahan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk dapat memaksimalkan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan adalah dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang diterapkan pada wilayah Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan temuan peneliti, TPA Labang di Desa Bunajih Kecamatan Labang ini merupakan satu-satunya TPA yang masih beroperasi yang menjadi harapan warga Kabupaten Bangkalan bebas penumpukan sampah. Oleh sebab itu permasalahan sampah yang sering muncul dalam penanganan sampah yaitu sedikitnya lahan untuk pembuangan sampah, biaya operasional pengangkutan sampah. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan terus menerus dikarenakan dapat menimbulkan permasalahan baru dalam jangka panjang yaitu mencemari lingkungan.

Permasalahan muncul ketika pembagian wilayah TPA antara lain zona penyangga dan zona budi daya terbatas sudah berkurang daya gunanya. Seperti zona penyangga semakin menyempit. Sedangkan kawasan Zona penyangga mutlak diperlukan karena berfungsi memberikan perlindungan kepada penduduk melakukan kegiatan sehari-hari terutama dari dampak secara langsung lingkungan. Luaylik, (2014).

Kemudian besarnya volume sampah ini tidak diiringi dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Hingga saat ini pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan masih menganut sistem lama yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah. Di sisi lain, sampai saat ini masalah penanganan sampah merupakan hal yang selalu berulang. Persoalan pengelolaan sampah Kabupaten Bangkalan tidak pernah terselesaikan dengan baik dan tuntas.

Penyebab timbulan sampah di Kabupaten Bangkalan yaitu seperti: limbah padat atau sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan, polusi bau dari sampah yang membusuk, pencemaran air akibat pembuangan sampah ke sungai atau badan air dan merembesnya air lindi (leachate) dari tempat pembuangan akhir (TPA) sampah kelahan atau pemukiman dan sumber air penduduk. Penyebab tingginya volume sampah di Kabupaten Bangkalan ini di sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang sangat beragam. Jumlah volume sampah terus meningkat, sementara daya tampung TPA sampah terbatas dengan pengelolaan yang belum ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, (2021).

bahwa tingkat timbulan sampah yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dengan penanganan yang dilakuakn terhadap pemgelolaan sampah terbilang masih kurang optimal, artinya pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Bangkalan perlu di evaluasi dan ditingkatkan lagi, mengingat dampak yang diakibatkan dari sampah tersebut dapat mengganggu lingkungan sekitar jika tidak di diatasi dengan baik.

Sehingga, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Tpa Buluh Kabupaten Bangkalan”.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan”?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan sampah yang telah berkontribusi dalam mengatasi masalah sampah.

IV Manfaat Penelitian

Hasil penelitian deskriptif kualitatif terhadap bagaimana pola komunikasi penderita bipolar dengan lingkungan sosial diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat yang diharapkan bagi mahasiswa adalah mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam menganalisa suatu masalah dengan menerapkan teori yang telah diperoleh dengan literatur dan membandingkan keadaan yang sebenarnya. Juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan sampah.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai tambahan referensi ilmu yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi penunjang pendidikan, serta dapat menambah wawasan baru bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan pokok kajian serupa di masa yang akan datang.

LANDASAN TEORI

I. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dye sebagaimana yang telah dikutip oleh Suaib (2016) menyatakan “Public Policy is whatever the government choose to do or not to do” (kebijakan publik Adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Dalam penjelasan tersebut, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Subarsono (2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, walaupun tanpa disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Menurut Sandigala dalam Anggara (2014), kebijakan publik yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (set of choosing) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.

Berdasarkan dari uraian diatas yang disampaikan dapat ditetapkan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah yang dilaksanakan oleh sekelompok aktor dan faktor yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai sasaran dan tujuan orang banyak.

II. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Thoaha, (2010) memaparkan evaluasi adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Menurut Subarsono (2013) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi juga baru dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Menurut Moekijat dikutip dalam Suaib (2016) evaluasi adalah usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan ataukah tidak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris dari suatu kebijakan guna untuk menilai tingkat kinerja dan menyelidiki apakah program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.

III. Pengertian Sampah

Sampah merupakan salah satu limbah yang terdapat di lingkungan. Bentuk, jenis, dan komposisi dari sampah dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan kondisi alam dari suatu daerah. Di negara maju, pengelolaan sampah telah di atur dengan berbagai macam cara agar mengurangi timbulan sampah yang ada, yaitu dengan disiplin melakukan pemilahan sampah agar metode pengelolaan yang digunakan lebih mudah diatur dan dicocokkan. Namun di negara berkembang, metode pemisahan sampah tidak berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Karena sampah yang dibuang masih bercampur antara sampah organik, anorganik, dan logam masih menjadi satu sehingga menyebabkan penanganan menjadi sulit. (Sumantri, 2015).

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan- perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. (Sri subekti, 2014).

Menurut (Widawati, dkk, 2014) menyatakan bahwa sampah adalah hasil sisa dari produk atau sesuatu yang dihasilkan dari sisa- sisa penggunaan yang manfaatnya lebih kecil dari pada produk yang digunakan oleh penggunaanya, sehingga hasil dari sisa ini dibuang atau tidak digunakan kembali.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sampah adalah hasil sisa kegiatan manusia (bukan kegiatan biologis) yang berbentuk padat dan dianggap tidak berguna lagi karena nilai manfaatnya berkurang atau tidak disenangi sehingga dibuang ke lingkungan

IV. Dampak Pencemaran Akibat Sampah

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) banyak permasalahan yang dapat ditemui dalam pengelolaan kebersihan seperti tidak tersedianya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, peraturan dan anggaran dana yang memadai, sehingga membuat tidak dapat menyediakan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan teknis akibatnya pencemaran lingkungan menjadi meningkat. Berbagai potensi yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran akibat sampah meliputi :

1. Perkembangan vektor penyakit

Tempat sampah yang didalamnya masih terdapat sisa makanan merupakan sumber tempat yang sangat ideal bagi pertumbuhan vektor penyakit seperti lalat dan tikus. Perkembangan vektor penyakit pada TPA disebabkan oleh frekwensi penutupan sampah yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Gangguan akibat lalat umumnya dapat ditemukan hingga radius 1-2 km dari lokasi TPA.

2. Pencemaran udara

Sampah yang menumpuk serta tidak tertutup dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau yang tidak sedap. Selain itu proses dekomposisi sampah di TPA secara kontinu akan menghasilkan gas seperti CO, CO₂, CH₄, H₂S dan lain-lain yang secara langsung akan mencemari udara serta mendorong terjadinya emisi gas rumah kaca yang memiliki kontribusi terhadap pemanasan global.

3. Pencemaran air

Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan leachate terutama pada saat turun hujan. Aliran leachate yang mengalir kesaluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran air dan air tanah.

4. Pencemaran tanah

Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik akan membuat lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga mengandung bahan buangan berbahaya (B3) yang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai terdegradasi.

5. Gangguan estetika

Lahan yang terisi sampah secara terbuka akan menimbulkan kesan pandangan yang sangat buruk dan tidak enak sehingga mempengaruhi estetika lingkungan sekitarnya. Sarana pengumpulan dan pengangkutan yang tidak terawat dengan baik merupakan sumber pandangan yang tidak baik.

6. Kemacetan lalu lintas

Lokasi penempatan sarana prasarana pengumpulan sampah yang berdekatan dengan sumber potensial seperti pasar, pertokoan dan lain-lain berpotensi menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas akibat kegiatan bongkar muat sampah yang dilakukan.

7. Gangguan kebisingan

Gangguan kebisingan ini lebih disebabkan karena adanya kegiatan operasi kendaraan alat berat dalam TPA (baik angkutan pengangkut sampah maupun kendaraan yang digunakan meratakan dan atau memadatkan sampah).

8. Dampak sosial

Hampir tidak ada orang yang akan merasa senang dengan adanya pembangunan tempat pembuangan sampah di dekat permukimannya. Keresahan warga setempat diakibatkan oleh gangguan-gangguan yang telah disebutkan diatas.

V. Pengertian Pengelolaan Sampah

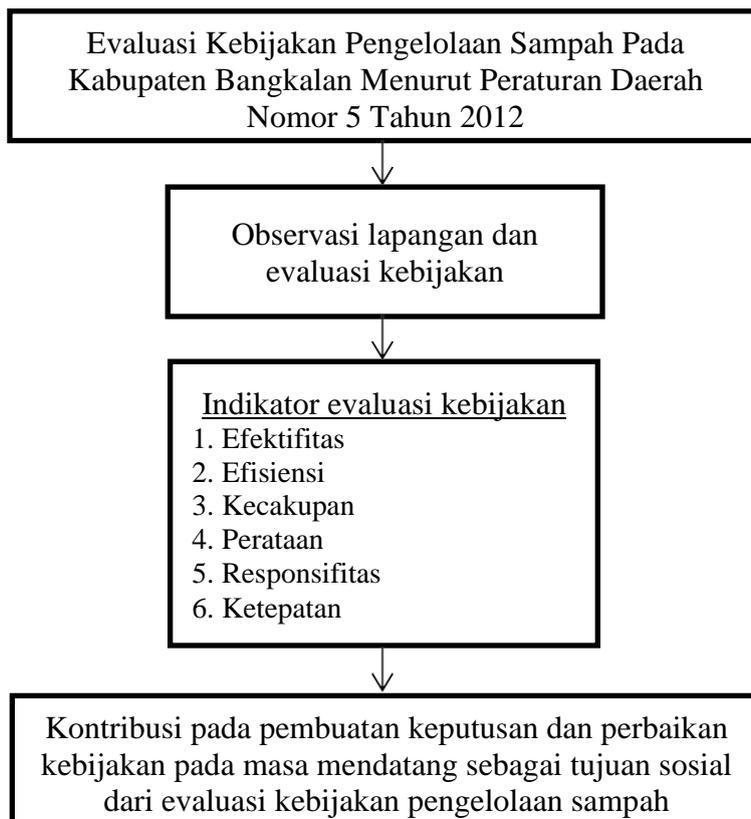
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012, pasal 1 ayat 10 tentang pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Pada pasal 3 menjelaskan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kartikawan dalam kutipan Subaris (2016) menjelaskan pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.

Dapat disimpulkan pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan lingkungan yang dilakukan sejak penumpukan sampah hingga pembuangan akhir.

Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012, pasal 1 ayat 5 tentang sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Subaris (2016) sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak disenangi, tidak terpakai atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia. Menurut Subaris (2016) menyatakan bahwa sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, yang tidak terjadi dengan sendirinya. Sehingga dapat disimpulkan sampah merupakan kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak digunakan kembali atau sudah tidak berguna

VI. Kerangka Pikir

Sesuai apa yang dikemukakan oleh William Dunn bahwa penilaian dari kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah disepakati, Berdasarkan uraian diatas alasan dipilihnya teori William Dunn dalam dikarenakan yang paling tepat dalam hal mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Kabupaten Bangkalan, evaluasi juga berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Adapun model kerangka pemikiran dari uraian diatas, yakni:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

METODOLOGI PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Menurut Tohirin (2012) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Moleong (2013) menjelaskan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sehingga pada penelitian ini peneliti merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mencocokkan antara realita mengamati perilaku, menggali dan menganalisis informasi-informasi yang berkaitan dengan teori yang berlaku mengenai “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kabupaten Bangkalan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) Buluh, Kabupaten Bangkalan)”

II. Definisi operasional dan pengukuran variabel

Berdasarkan tema yang di angkat oleh peneliti yaitu bagaimana Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kabupaten Bangkalan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) Buluh, Kabupaten Bangkalan), maka definisi konseptual yang peneliti berikan adalah:

1. Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart (dalam Hildawati, 2018) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil atau dampak dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan tersebut dapat diuraikan indikator dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas, yaitu pencapaian hasil yang diinginkan:
 - a. Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
 - b. Cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan
 - c. Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia
2. Efisiensi, yaitu usaha-usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan:
 - a. Adanya anggaran khusus bagi Kecamatan dalam pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan.
 - b. Kejelasan tentang cakupan area pelayanan persampahan untuk setiap kecamatan
 - c. Pengelolaan masalah sampah dengan prinsip 3R
3. Kecukupan, yaitu adanya pemecahan masalah dari hasil yang diinginkan:
 - a. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan peraturan.
 - b. Pemanfaatan anggaran dimaksimalkan untuk pencapaian tujuan pendelegasian wewenang
 - c. Berkurangnya volume sampah dibandingkan dengan waktu sebelumnya
4. Pemerataan, yaitu pendistribusian biaya dan manfaat yang merata:
 - a. Beban retribusi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Pemungutan retribusi dilakukan secara merata disetiap kecamatan
5. Responsivitas, yaitu dampak kebijakan terhadap kelompok dimasyarakat
 - a. Keterlibatan masyarakat (Partisipasi) dalam menjaga kebersihan lingkungan

- b. Dukungan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pelimpahan wewenang masalah sampah ke kecamatan
6. Ketepatan, yaitu manfaat atau kegunaan hasil yang diinginkan:
 - a. Ketersediaan TPS di beberapa titik untuk setiap Kecamatan
 - b. Terdapatnya Petugas khusus di kecamatan untuk memungut Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan

III. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana eksplorasi dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah utama dalam penelitian kualitatif sebab telah dijelaskan penelitian kualitatif diperlukan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dan berguna memperoleh data yang akurat atau mendekati kebenaran dari keadaan yang ada. Agar mendapat suatu data yang akurat atau mendekati kebenaran dari keadaan yang ada. Agar mendapat suatu data yang akurat sesuai dengan fokus penelitian, maka lokasi yang menjadi target untuk melakukan penelitian adalah Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) buluh Kabupaten Bangkalan).

IV. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) di dalam sebuah penelitian diperlukan analisis data agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan efektif sehingga di dalam proses penelitian tidak terjadi kesalahan. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (3rd ed.), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

1. Data Condensation (kondensasi data)

Data kondensasi mengacu pada proses proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, sehingga data akan tersusun sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat naratif yaitu untuk memahi apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. *Conclusion Drawing and Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data merupakan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah. Karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan rangkaian penyimpanan data, metode pencarian yang digunakan, dan dokumentasi hasil dari peneliti.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

I. Pembahasan Hasil Penelitian

Di dalam penelitian akan di bahas mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dijelaskan oleh evaluasi kebijakan menurut Dunn (1994) dikutip dalam Hildawati, (2018), yang terdiri dari enam aspek untuk menganalisis, sebagai berikut:

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

Efektivitas merupakan yaitu pencapaian hasil yang diinginkan dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan. Dalam variabel Efektivitas terdapat 3 sasaran yang akan diteliti, yaitu: a). Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. b). cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan, c). Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia.

a). Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

Bahwa pengangkutan sampah dari tps ke tpa di kabupaten Bangkalan tergantung pada kebutuhan dan kapasitas penanganan sampah di daerah tersebut. Jumlah kendaraan dan jadwal pengangkutan diatur sesuai dengan volume dan karakteristik sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan pengangkutan sampah dilakukan secara teratur dan efektif.

b). Cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan

Bahwa cara pengumpulan sampah di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangkalan dapat bervariasi, tergantung pada sistem pengelolaan sampah yang diterapkan. Pemilihan metode pengumpulan sampah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Pengumpulan dilakukan dengan 2 jenis yaitu pengumpulan individual dan komunal. Pengumpulan individual sebagian besar dilakukan oleh organisasi masyarakat yang kemudian dikumpulkan di transfer depo untuk diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup menuju TPA, sedangkan pengumpulan komunal melibatkan pengumpulan dan pengelolaan sampah dari beberapa rumah tangga atau area yang berdekatan. Ini biasanya dilakukan melalui sistem pengumpulan yang terpusat, seperti penggunaan kontainer sampah komunal di lokasi strategis dalam komunitas atau pengumpulan sampah dari area perumahan yang terorganisir. Dalam pengumpulan sampah komunal, petugas pengumpul sampah akan mengunjungi area tersebut secara teratur untuk mengumpulkan sampah dari setiap wadah sampah komunal dan memastikan pengelolaan sampah yang tepat.

c). Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia

Pengelolaan sampah di daerah yang lebih luas seperti kabupaten Bangkalan, biasanya tersedia beberapa unit Kaisar dengan kapasitas muatan yang lebih besar, seperti dump truk atau kendaraan serupa yang mampu mengangkut sampah dalam jumlah besar. Sementara itu, gerobak sampah digunakan untuk pengumpulan sampah di tingkat yang lebih lokal, seperti di sekitar pemukiman atau area yang sulit dijangkau oleh kendaraan berukuran besar

Berdasarkan uraian diatas bahwa efektifitas pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan belum terbilang efektif, dikarenakan masih hanya mencakup 4 kecamatan saja, akan tetapi pemerintah Kabupaten Bangkalan tetap terus berusaha melakukan pembenahan terhadap tata pengelolaan sampah sehingga nantinya tidak ada lagi permasalahan sampah yang menumpuk di TPA maupun TPS di lingkungan masyarakat. Karena pentingnya manajemen pengelolaan sampah. Efektivitas pengelolaan sampah ini dapat berjalan dengan baik jika ada kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, artinya pengelolaan sampah di Bangkalan juga harus berbasis masyarakat, baik pemilahan sampah dari rumah tangga, perkantoran atau kegiatan-kegiatan usaha ekonomi baik skala kecil atau besar

2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, efisiensi dapat dilihat sebagai upaya untuk meminimalkan penggunaan sumber daya (misalnya waktu, energi, tenaga kerja) dalam proses pengumpulan dan pengelolaan sampah, sementara tetap mencapai hasil yang optimal. Dengan cara ini, efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang terbatas dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan output yang diinginkan dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan. Dalam variabel efisiensi terdapat 3 sasaran yang akan diteliti, yaitu:

a). Anggaran Khusus Bagi Kecamatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Bangkalan.

Bahwa anggaran khusus ini penting untuk mendukung pengelolaan pelayanan persampahan di setiap Kecamatan, memastikan tersedianya sumber daya yang cukup untuk menjalankan program pengelolaan sampah secara efektif dan efisien di Kabupaten Bangkalan. Rincian mengenai anggaran tersebut dapat diketahui melalui peninjauan rencana anggaran yang diajukan secara rutin oleh masing-masing Kecamatan ke pemerintah Kabupaten Bangkalan.

b). Kejelasan Tentang Cakupan Area Pelayanan Persampahan Untuk Setiap Kecamatan.

Bahwa cakupan area pelayanan persampahan yang di pemerintah kabupaten Bangkalan hanya 4 kecamatan saja meliputi 1. kecamatan kota, 2 kecamatan burmeh, 3 kecamatan sochah dan 4. kecamatan kamal, jadwal pengangkutan sampah, sistem pemilahan sampah, dan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik

c). Pengelolaan masalah sampah dengan prinsip 3R sudah berjalan seperti apa di Kabupaten Bangkalan.

Bahwa pendekatan melalui 3R, Pemkab Bangkalan saat ini dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di Kabupaten Bangkalan. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa pendekatan ini perlu didukung oleh kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, serta sistem pengelolaan sampah yang baik dan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan uraian diatas bahwa efisiensi pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan sudah berjalan dengan baik karena terdapat beberapa upaya yang dilakukan dari pemerintah kabupaten Bangkalan, seperti: infrastruktur dan Fasilitas: Keberadaan infrastruktur yang memadai, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), pusat daur ulang, dan fasilitas pengolahan sampah, dapat berkontribusi pada efisiensi pengelolaan sampah, kemudian, 2. Pemilahan dan Daur Ulang: Implementasi sistem pemisahan sampah di sumber dan penggunaan praktik daur ulang yang efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dengan mengurangi jumlah sampah yang akhirnya harus dibuang. 3. Pengangkutan dan Penjadwalan: Sistem pengumpulan sampah yang efisien dengan penjadwalan yang tepat dapat mengurangi waktu dan biaya dalam proses pengelolaan sampah.

3 Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah.

Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan di kabupaten Bangkalan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah lingkungan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggal di mana mereka melakukan aktivitas. Dengan memberikan kewenangan kepada kecamatan, Pemkab Bangkalan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan dapat menghadirkan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kebersihan dan sampah di Kabupaten Bangkalan. Dalam variabel kecukupan terdapat 3 sasaran yang akan diteliti, yaitu:

a). Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan peraturan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Bangkalan dilakukan secara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan persampahan dan pengelolaan sampah yakni peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Berikut adalah beberapa poin terkait pelaksanaan pemungutan retribusi sampah yang sesuai dengan peraturan di Kabupaten Bangkalan: 1. Tarif Retribusi. 2. Jadwal Pemungutan. 3. Pencatatan dan Pelaporan. 4. Penegakan Peraturan. Dengan adanya pelaksanaan pemungutan retribusi sampah yang sesuai dengan peraturan, diharapkan masyarakat di Kabupaten Bangkalan dapat mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi dalam pembiayaan layanan persampahan.

b). Pemanfaatan anggaran dimaksimalkan untuk pencapaian tujuan pendelegasian wewenang.

Bahwa pemerintah kabupaten Bangkalan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kecamatan dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam pelayanan persampahan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c). Berkurangnya volume sampah dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

Meskipun terjadi penurunan volume sampah, tetap diperlukan upaya berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan sampah tetap tinggi. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi pertumbuhan populasi yang dapat berdampak pada volume sampah di masa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kecukupan pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan termasuk dalam kategori cukup karena di kabupaten Bangkalan sendiri sudah terdapat fasilitas yang mencukupi diantaranya: infrastruktur dan Fasilitas, pemilahan dan Daur Ulang sampah dan pengangkutan dan Penjadwalansampah.

4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.

Pemerataan berarti bahwa biaya dan manfaat dari pelayanan persampahan dan kebersihan didistribusikan secara merata kepada kelompok yang berbeda di masyarakat. Tujuan dari pelimpahan wewenang dalam masalah sampah adalah untuk mewujudkan pemerataan pelayanan persampahan dan kebersihan yang belum sepenuhnya tercapai di Kabupaten Bangkalan. Dalam variabel pemerataan terdapat 2 sasaran, yaitu:

- a). Beban retribusi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten Bangkalan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan retribusi pelayanan persampahan, sehingga dapat memastikan bahwa beban retribusi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Bangkalan

- b). Pemungutan retribusi dilakukan secara merata disetiap kecamatan.

Bahwa untuk menjalankan pemungutan retribusi yang merata, pemerintah kabupaten Bangkalan harus memiliki mekanisme yang jelas dan transparan dalam penetapan tarif retribusi, proses pembayaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan. Selain itu, penting juga untuk memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai manfaat yang mereka peroleh dari pemungutan retribusi tersebut dan bagaimana dana yang terkumpul digunakan untuk meningkatkan pelayanan persampahan dan kebersihan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pemerataan pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan, kurang merata karena di kabupaten Bangkalan hanya melayani 4 kecamatan saja. Pemerataan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap wilayah atau bagian dalam Kabupaten Bangkalan memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan pengelolaan sampah yang efektif. Tujuan dari pemerataan ini adalah untuk mencegah ketimpangan dalam perlakuan dan kualitas pengelolaan sampah antara daerah yang satu dengan yang lain. Beberapa langkah yang diambil untuk mencapai pemerataan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan antara lain: 1. Evaluasi Kebutuhan: Melakukan evaluasi terhadap kondisi dan kebutuhan pengelolaan sampah di setiap wilayah Kabupaten Bangkalan. Hal ini melibatkan analisis mengenai infrastruktur yang tersedia, volume sampah yang dihasilkan, dan karakteristik masyarakat setempat. 2. Perencanaan Strategis: Merancang rencana strategis pengelolaan sampah yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. Rencana ini harus memperhitungkan kebutuhan khusus masing-masing wilayah, termasuk alokasi sumber daya dan investasi yang adil. 3. Infrastruktur yang Merata: Membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. Ini mencakup pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA), pusat daur ulang, dan fasilitas pengolahan sampah di berbagai wilayah, sehingga setiap daerah memiliki akses yang memadai. 4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan partisipasi aktif dalam pemilahan sampah dan praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Ini akan membantu masyarakat di setiap wilayah Kabupaten Bangkalan untuk memahami peran mereka dalam menjaga lingkungan bersih dan sehat. 5. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi pengelolaan sampah di setiap wilayah Kabupaten Bangkalan. Ini akan memastikan bahwa pemerataan dalam pengelolaan sampah terus berlangsung dan mengevaluasi keberhasilan langkah-langkah yang diambil.

5. Responsivitas, Apakah Hasil Kebijakan Memuaskan Kebutuhan Preferensi Atau Nilai Kelompok-Kelompok Tertentu.

Responsivitas dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak yang nyata dan positif terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat. Terdapat 2 sasaran, yaitu:

- a). Keterlibatan masyarakat (Partisipasi) dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Salah satu bentuk dukungan masyarakat di kabupaten Bangkalan terhadap konsep pelimpahan wewenang terkait dengan permasalahan sampah dan kebersihan ini dapat berupa kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan oleh Kecamatan untuk tetap menciptakan kondisi hidup bersih dan sehat. Untuk kelancaran pengelolaan sampah ini, diharapkan dukungan masyarakat dengan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Bahwa di kabupaten Bangkalan ada yang namanya sekolah adiwiyata, kelurahan berseri ini adalah respon masyarakat untuk terlibat dalam pengolahan sampah kemudian terdapat bank sampah dan dikelola oleh rt/rw, serta tps 3r dikelola oleh kelurahan dan ini adalah bukti bahwasannya komitmen keterlibatan masyarakat Bangkalan dalam pengelolaan sampah.
- b). Dukungan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pelimpahan wewenang masalah sampah ke kecamatan.

Bahwa dengan menjadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten Bangkalan dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Responsivitas yang baik juga dapat membantu menciptakan hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa responsivitas pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan sejauh ini cukup responsif berdasarkan dari pengamatan langsung penelitian di lapangan, responsivitas dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan mengacu pada kemampuan dan kecepatan dalam menanggapi perubahan, tantangan, atau kebutuhan yang muncul terkait pengelolaan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi responsivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan antara lain: 1. Sistem Pengumpulan: Responsivitas pengelolaan sampah dapat dievaluasi melalui sistem pengumpulan yang efektif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Hal ini meliputi penjadwalan pengangkutan yang sesuai, penambahan atau pengurangan titik pengumpulan sampah sesuai dengan pertumbuhan populasi, atau penyesuaian jadwal operasional untuk mengatasi situasi darurat atau kejadian khusus. 2. Pengolahan dan Pemrosesan: Responsivitas pengelolaan sampah juga terkait dengan kemampuan untuk mengatasi peningkatan volume sampah atau adanya jenis sampah baru yang perlu diolah atau diproses secara efisien. Memiliki fasilitas pengolahan dan pemrosesan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dapat meningkatkan responsivitas dalam menghadapi perubahan kondisi. 3. Inovasi dan Teknologi: Penerapan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan responsivitas. Misalnya, penggunaan sistem pengumpulan dan pemantauan berbasis teknologi untuk mengoptimalkan rute pengumpulan sampah, penggunaan teknologi sensor untuk memantau kapasitas wadah sampah, atau pemanfaatan teknologi canggih dalam pengolahan dan daur ulang sampah. 4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Responsivitas pengelolaan sampah juga bergantung pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang teredukasi dan sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik akan merespons dengan baik perubahan kebijakan atau program yang diperkenalkan. Kesadaran masyarakat juga penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan

6. Ketepatan, Apakah Hasil (Tujuan) Yang Diinginkan Benar-Benar Berguna Atau Bernilai.

Ketepatan dalam konteks evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan merujuk pada sejauh mana hasil evaluasi tersebut memberikan manfaat atau kegunaan yang diinginkan, terdapat 2 sasaran, yaitu:

- a). Ketersediaan TPS di beberapa titik untuk setiap Kecamatan

Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Bangkalan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kondisi setiap kecamatan. Informasi yang spesifik mengenai jumlah dan lokasi TPS di masing-masing kecamatan mungkin perlu dikonfirmasi langsung kepada pemerintah daerah setempat atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Namun, dalam usaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten biasanya berupaya menyediakan TPS yang cukup dan strategis di setiap kecamatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Dalam prakteknya, TPS biasanya didesain dan ditempatkan di lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi TPS antara lain kepadatan penduduk, jenis kegiatan yang menghasilkan sampah, serta ketersediaan lahan yang memadai. Sebagai contoh, setiap kecamatan mungkin memiliki beberapa TPS yang tersebar di wilayahnya, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. TPS ini biasanya berupa kontainer atau wadah yang disediakan untuk pengumpulan sementara sampah sebelum diangkut ke tempat pemrosesan atau pembuangan akhir.

- b). Terdapatnya Petugas khusus di kecamatan untuk memungut Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bahwa adanya petugas khusus di kecamatan, diharapkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dapat dilakukan secara teratur dan merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Hal ini akan mendukung keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan sampah serta pembiayaan layanan persampahan di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kecukupan pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan, sampai sejauh ini sesuai pengamatan di lapangan dirasa sangat kurang, karena selama ini hanya 4 kecamatan saja yang dilayani kemudian infrastruktur dan Fasilitas: Evaluasi ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) , pusat daur ulang, dan fasilitas pengolahan sampah, keberadaan infrastruktur di kabupaten Bangkalan yang sekarang ini bisa dikatakan cukup memadai dan mencukupi, pengumpulan Sampah: Penilaian terhadap sistem pengumpulan sampah, termasuk jadwal pengangkutan yang teratur dan luas jangkauannya yang memadai dan tepat waktu penting untuk mencegah penumpukan sampah dan potensi dampak negatifnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan, adapun kesimpulan dari penelitian ini, yakni:

1. Efektifitas, Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Buluh Kabupaten Bangkalan sudah dilakukan seefektifnya dimana hal tersebut tercermin dalam pengurangan volume sampah, pengelolaan gas methana yang efisien, peningkatan kebersihan dan ketertiban di area TPA, serta pemenuhan regulasi lingkungan yang berlaku.

2. Efisiensi

Dengan menerapkan praktik pengelolaan sampah yang efisien di TPA Buluh Kabupaten Bangkalan, penggunaan sumber daya yang optimal, pengurangan limbah yang terbuang, peningkatan efisiensi operasional, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar

- 3 Kecukupan

Pemecahan masalah dan pencapaian hasil yang diinginkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan menjadi tolok ukur kecukupan. Dalam hal ini, keberhasilan dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang ditetapkan, seperti pengurangan volume sampah, peningkatan daur ulang, atau peningkatan kebersihan lingkungan, menunjukkan kecukupan dari pemecahan masalah yang diinginkan.

4. Pemerataan, pemerataan dalam konteks pengelolaan sampah di Bangkalan merujuk pada hanya pada 4 kecamatan yang di layani oleh TPA Buluh Kabupaten Bangkalan ini berarti bahwa pemerataan layanan akan pengelolaan sampah kurang proporsional adil dan merata mengingat daerah Kabupaten Bangkalan juga cukup luas.

5. Responsivitas

Bahwa kebijakan tentang pengelolaan sampah yang diambil memberikan respons yang efektif dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini, responsivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan memperhatikan variasi dan perbedaan dalam kelompok-kelompok masyarakat. Setiap kelompok

masyarakat memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dalam hal pengelolaan sampah, tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, tingkat pendapatan, aksesibilitas, dan kebutuhan khusus.

6. Ketepatan

Dalam konteks evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan merujuk pada sejauh mana hasil evaluasi tersebut memberikan manfaat, dimana ketepatan tersebut hanya mencakup 4 kecamatan di bangkalan yang terlayani dalam pengelolaan sampah.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan peneliti, maka saran dan masukan dapat diberikan, sebagai berikut:

1. Pengolahan sampah dengan metode open dumping di Kabupaten Bangkalan saat ini tidak lagi sesuai dengan keadaan, terutama karena jumlah sampah yang terus meningkat. Metode open dumping dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, baik secara fisik maupun nonfisik. Dalam konteks peningkatan jumlah timbulan sampah, metode open dumping dapat menyebabkan penumpukan sampah yang tidak terkendali. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta mengundang masalah kesehatan masyarakat. Selain itu, bau tidak sedap, penyebaran hama, dan kerusakan estetika lingkungan juga merupakan dampak negatif yang sering terjadi akibat penggunaan metode open dumping. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan dalam sistem pengolahan sampah di Kabupaten Bangkalan. Penggunaan metode open dumping perlu digantikan dengan metode yang lebih modern, seperti pengolahan sampah secara terkontrol dan terpadu. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi standar teknis dan lingkungan. TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan seperti pemadatan, pengomposan, atau pengolahan energi dari sampah.
2. Sebaiknya pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan juga didukung dengan pelimpahan atau transfer sumber daya yang mencakup aspek dana, sarana prasarana, dan ketersediaan aparatur pelaksana di Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya pelimpahan sumber daya ini, kecamatan akan memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan yang baik, termasuk dalam hal sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelimpahan tersebut. Hal ini akan memungkinkan kecamatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di wilayahnya. Dalam hal dana, penting untuk memastikan bahwa kecamatan memiliki anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang dialihkan kepadanya.
3. Setiap kelurahan diharapkan memiliki minimal 3 TPS (Tempat Pembuangan Sampah) untuk dapat mengakomodasi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dengan adanya jumlah TPS yang memadai, diharapkan tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Pemerintah setempat perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk dinas lingkungan hidup dan kelurahan, untuk memastikan penempatan, pengelolaan, dan pemeliharaan TPS dilakukan dengan baik. Selain itu, penting juga untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempat yang ditentukan, sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia
- Dunn, W. N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Faisol, Ahmad. 2021. DLH Bangkalan Optimalkan TPS 3R, Agar Volume Sampah 60 Ton Sehari Bisa Berkurang 70 Persen <https://surabaya.tribunnews.com/2021/10/13/dlh-bangkalan-optimalkan-tps-3r-agar-volume-sampah-60-ton-sehari-bisa-berkurang-70-persen>. Diakses 17 Oktober 2021.
- Faisol, Ahmad. 2020. Warga Desa Binajih Bangkalan Berharap Pengolahan TPA Sampah di Desanya hingga begini. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/03/12/warga-desa-binajuh-bangkalan-berharap-pengolahan-tpa-sampah-di-desanya-hingga-begini>. Diakses 17 Oktober 2021.

- Hildawati, 2018. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Di Kota Dumai" (Studi Pasca Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Dibidang Persampahan). *Jurnal Publika*, Vol. 5, No.1 Hal. 332-348.
- Japan International Cooperation Agency, "International Training on Strengthening District Health Planning in the Era of Decentralization for Improvement of the Health Status of Children and Mothers, Thematic Issues: South-South and triangular Cooperation", xiv. https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/south/project03.html (Diakses pada 15 April 2019).
- Khaira, M., Hasanah, U., & Hayati, I. 2019. Peran Bank Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga di Desa Sait Buttu Kec. Pematang Sidamanik. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2(2):187-195.
- Luaylik, (2014). Evaluasi Dampak Tpa Metode Open Dumping Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Universitas Madura.
- Madura, Mata. 2021. Bupati Ra Latif Dinilai Gagal Urus Sampah di Bangkalan. <https://matamaduranews.com/bupati-ra-latif-dinilai-gagal-urus-sampah-di-bangkalan/>. Diakses 17 Oktober 2021
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, A., Sutjahjo, S. H., & Amin, A. A. (2018). Analisis Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(1), 7-14. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.7-14>.
- Rendy, Mohammad, (2015). "Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah Di dinas kebersihan dan pertanaman Kota Palu". *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015 hlm 73-79. ISSN: 2302-2019
- Sahara, (2013). Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidoarjo (Studi di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Desa Kemiri Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo). Skripsi UPN "Veteran" Jatim. Studi Ilmu Administrasi Negara.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sundarso, Purnaweni dan Hardiyanti, (2021). "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 9 (1): 1-10. DOI: <https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4301>
- Subarudi, Ariawan, Mulyadin dan Iqbal, (2021). "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 19 No. 2 November 2022: 129-140. P-ISSN 0216-0897. E-ISSN 2502-6267.
- Suaib, Muhammad Ridha. (2016). Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, *Good Governance* hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Calpulis.
- Subarudi, Ariawan, Mulyadin dan Iqbal, (2022). "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 19 No. 2 November 2022: 129-140
- Subaris, H. (2016). Promosi Kesehatan Pernerdayaan Masyarakat, Dan Modal Sosial. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- _____, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik. Pustaka Pelajar
- _____. (2015). Analisis Kebijakan publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tohirin. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. (2010). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
- Winarno. (2012). Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi & Revisi Terbaru. Yogyakarta: CAPS
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2012 Kabupaten Bangkalan Tentang Pengelolaan Sampah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangkalan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum

KUALITAS PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALU LAYANAN DRIVE THRU PADA SISTEM MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KATANG KABUPATEN KEDIRI

Ahmad Farkhan Bahari Ilmy¹, Dr. Diana Hertati, M.Si^{2*}
1Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat e-mail: farkhanilmy@gmail.com
*Corresponding author: diana.adneg@gmail.com

Abstrak

Histori Artikel

Submitted
20 Juli 2023
Reviewed
21 Juli 2023
Accepted
21 Juli 2023
Published
29 September 2023

Pelayanan merupakan tugas utama pemerintah dalam memberikan pelayanan publik baik pada tingkat pusat maupun daerah, untuk mempermudah akses pelayanan publik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah pada bidang tertentu dalam menyelenggarakan urusan publik dengan tujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui strategi peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Salah satu jenis pelayanan publik yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah pelayanan dalam bidang pembayaran pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar, Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak

kendaraan bermotor kepada masyarakat adalah melalui pelayanan unggulan, seperti : Samsat Drive Thru, Samsat Payment Point, Samsat Corner, Samsat Keliling Mandiri Samsat Keliling, Samsat Link, E-Sasat Jatim, ATM Samsat Jatim, Mesin Embosser, dan layanan terbaru adalah bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia. Kantor Bersama Samsat Katang Kabupaten Kediri merupakan salah satu tempat pelayanan publik untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berada dibawah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri. Unit pelayanan SAMSAT Drive Thru merupakan salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Katang Kabupaten Kediri .Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan maksud memberi gambaran komprehensif dan mendalam terhadap kajian penelitian,Sasaran kajian penelitian ini menggunakan teori Zeithaml, Parasuraman dan Berry (Pasolong, 2013:135) dalam mengetahuinya terdapat lima dimensi sebagai tolak ukur kepuasan konsumen atau pelanggan yaitu Tangibles (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), Emphaty (empati) .Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pada aspek berwujud dari petugas layanan sudah berkualitas baik akan tetapi aspek sarana dan prasarana belum memberikan kenyamanan karena tempat permbayaran terlalu sempit apabila diberlakukan dua kasir sehingga aspek sarana dan prasarana memberikan kualitas yang buruk, kemudian kehandalan dari petugas layanan dalam proses penyelesaian pelayanan kualitasnya sudah sangat baik, adapun Ketanggapan petugas layanan merespon, membantu menyediakan layanan yang cepat dan tepat sudah sangat baik, serta jaminan yang diberikan petugas layanan seperti ketepatan waktu penyelesaian layanan, pengawasan dan legitimasi yang sudah sesuai dan berkualitas sangat baik, aspek empati dari petugas layanan berupa sopan santun petugas pelayanan dan tidak diskriminatif yang menunjukkan kualitas sangat baik , akan tetapi pada aspek keramahan memberikan kualitas yang belum baik.

Kata kunci: Kualitas, Kualitas Pelayanan, Pelayanan Drive Thru, Pajak Kendaraan Bermotor.

Abstract

Service is the main task of the government in providing public services both at the central and regional levels, to facilitate access to public services as stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the central government gives authority to regional governments in regulating and managing regional government affairs in certain fields in carrying out public affairs with the aim of accelerating community welfare through strategies to improve services, empowerment and community participation. One type of public service that needs to get more attention is the service in the field of paying regional taxes, Motor Vehicle Tax is a regional tax which is used as one of the largest sources of income, the East Java Provincial Revenue Agency in improving the quality of motorized vehicle tax collection services to the public is through superior services, such as: Samsat Drive Thru, Samsat Payment Point, Samsat Corner, Mobile Samsat Mandiri Mobile Samsat, Samsat Link, E-Sasat East Java, ATM Samsat East Java, Embosser Machine, and the newest service is in collaboration with PT. Indonesian post. The Kediri Regency Samsat Katang Joint Office is one of the public service places for the payment of Motor Vehicle Tax (PKB) and Motorized Vehicle Ownership Fee (BBNKB) which are under the Technical Implementation Unit of the East Java Province Revenue Agency Kediri. The SAMSAT Drive Thru service unit is one of the breakthroughs in efforts to improve service quality at the Katang Joint Samsat Office, Kediri Regency. In this study the authors used a qualitative research approach with the intention of providing a comprehensive and in-depth overview of research studies. The target of this research study used the Zeithaml, Parasuraman theory and Berry (Pasolong, 2013: 135) in knowing that there are five dimensions as a measure of consumer or customer satisfaction, namely Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty. The results of the study show that the service on the Tangibles aspects of the service staff is of good quality, but the facilities and infrastructure aspects have not provided comfort because the place for payment is too narrow if two cashiers are applied so that the facilities and infrastructure aspects provide poor quality, then the Reliability of the service staff in the process of completing the quality service is already very good, while the Responsiveness of service personnel responds, helps provide fast and appropriate services which is very good, as well as guarantees provided by service officers such as timely completion of services, supervision and legitimacy which are appropriate and of very good quality, the empathetic aspect of service officers is polite polite and non-discriminatory service staff which shows very good quality, but in the hospitality aspect it provides not good quality.

Keywords: *Quality, Service Quality, Drive Thru Service, Motor Vehicle Tax.*

PENDAHULUAN

Pelayanan merupakan tugas utama pemerintah dalam memberikan pelayanan publik baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tentu saja tidak dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah pusat kepada rakyat, tetapi melalui pemerintah daerah. Pelayanan pemerintah banyak menjadi sorotan publik, hal ini dikarenakan pelayanan yang diberikan seringkali dianggap tidak memuaskan masyarakat. Seperti yang tersusun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kewajiban maupun kebutuhan tidak terkecuali pada pelayanan publik.

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Reformasi pelayanan publik adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam hal ini reformasi pelayanan publik berupa perubahan kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan kepada penerima pelayanan publik.

Untuk menentukan sebuah kualitas pelayanan baik atau tidak menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry (Pasolong, 2013:135) dalam mengetahuinya terdapat lima dimensi sebagai tolak ukur kepuasan konsumen atau pelanggan yaitu *Tangibles* (berwujud), *Reliability* (kehandalan), *Responsiveness* (ketanggapan), *Assurance* (jaminan), *Emphaty* (empati).

Salah satu jenis pelayanan publik yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah pelayanan dalam bidang pembayaran pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 nomor 18 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan terbesar di Indonesia, maka dari itu diharapkan segala aspek elemen yang ada dalam pelayanan pembayaran pajak agar dapat dibentuk sebaik-baiknya sehingga dengan membaiknya pelayanan pembayaran pajak akan mampu menarik masyarakat agar lebih partisipatif dan aktif dalam membayar pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar, apabila suatu kualitas pelayanan meningkat maka akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak kendaraan bermotor. Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat adalah melalui pelayanan unggulan.

Kantor Bersama Samsat Katang Kabupaten Kediri merupakan salah satu tempat pelayanan publik untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berada dibawah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan di bidang pemungutan pendapatan daerah sedangkan salah satu fungsinya yaitu sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Unit pelayanan SAMSAT Drive Thru merupakan salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Katang Kabupaten Kediri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kendaraan Bermotor, Pasal 22 menyebutkan bahwa demi meningkatkan kualitas layanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan mendirikan unit pembantu.

Drive thru merupakan salah satu layanan sebagai bentuk penerapan dari pelaksanaan program Quick Wins yang dicanangkan oleh POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) bekerjasama dengan BUMN PT. Jasa Raharja dan Dinas Pendapatan Provinsi. Layanan ini juga menjadi salah satu bentuk untuk memperbaiki dan memperbaharui pelayanan agar wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi seperti: tidak memerlukan waktu yang lama dalam melakukan transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor selain itu wajib pajak tidak perlu untuk turun dari kendaraan untuk mengantri dalam pembayaran.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan maksud memberi gambaran komprehensif dan mendalam terhadap kajian penelitian, yaitu Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Drive Thru Di Samsat Katang Kabupaten Kediri. Menurut Sugiyono (2018:8), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji fenomena yang akan diteliti, guna memperoleh data yang akurat dan lebih spesifik. Dalam hal ini untuk mendapatkan suatu data yang akurat kebenarannya sesuai dengan objek penelitian, maka peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian di Samsat Katang Kabupaten Kediri. Penulis sendiri memilih tempat penelitian yang bertempat pada Samsat Katang Kabupaten Kediri dikarenakan sesuai dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan Drive Thru pada Samsat Katang Kabupaten Kediri.

HASIL

1. Tangibles

Dari beberapa hasil berdasarkan dimensi Berwujud, dapat diketahui bahwa penampilan setiap petugas selalu rapi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pihak Samsat Katang Kabupaten Kediri. Kemudian dari indikator kenyamanan tempat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan drive thru sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana metode pembayaran melalui drive thru sudah memanfaatkan fasilitas yang ada dengan semaksimal mungkin akan tetapi kurang didukung oleh tempat pelayanan yang sempit dan juga menurut masyarakat untuk kenyamanan masih dirasa kurang apabila wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran membludak di karenakan tempat yang sempit.

Berbagai pendapat juga diberikan oleh masyarakat sebagai wajib pajak yang menggunakan layanan drive thru sebagai tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satunya dikemukakan oleh Bapak Nanang Setiawan sebagai wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan drive thru pada Samsat Katang Kabupaten Kediri, dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk tempat pembayaran drive thrunya sudah sesuai, kita bisa langsung tanpa turun dari kendaraan. Akan tetapi jika pas berbarengan begini jika diberlakukan dua kasir akan berdempetan dengan motor wajib pajak lain”. (Hasil wawancara 26 September 2022).

Sama halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Nanang Setiawan, pendapat oyang serupa juga diutarakan oleh bapak Marzam Abdulrohim, yang telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan drive thru pada Samsat Katang Kabupaten Kediri, Bapak Marzam Abdulrohim menyatakan bahwa:

“Kalau pas ramai begini kalau buat antri pembayaran dua baris berasa kurang nyaman karena terasa berhimpitan antar pembayar yang lain. Tapi kalau diberlakukan satu kasir bakal mengekor panjang”. (Hasil wawancara 26 September 2022).

Kemudian, dari indikator kedisiplinan petugas, petugas drive thru Samsat Katang Kabupaen Kediri sudah disiplin dengan kehadiran sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk melakukan absensi dan apel pagi dan dilanjutkan melakukan pelayanan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat bantu dalam pelayanan, dapat diketahui bahwa alat bantu yang digunakan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui drive thru di SAMSAT Katang Kabupaten Kediri antara lain perangkat komputer, printer, koneksi internet, notice pembayaran, dan genset dimana semua alat bantu dalam keadaan yang baik.

2. Reliability

Berdasarkan pernyataan informan diatas petugas pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Drive Thru dapat disimpulkan bahwa petugas cukup cermat dan handal dalam proses memberikan pelayanan, hal ini dibuktikan dengan menggunakan alat bantu berupa komputer dan printer untuk memastikan pelayanan dilakukan dengan benar.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Puja Trileksana, selaku petugas pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui drive thru menyatakan sebagai berikut:

“Untuk memastikan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan juga untuk mengkonfirmasi wajib pajak kita menggunakan komputer yang sudah terintegrasi dengan server yang mencakup data kendaraan, penggunaan komputer ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dan juga sebagai alat konfirmasi yang tersambung dengan data base kendaraan”. (Hasil wawancara 26 September 2022).

Hal serupa juga diutarakan oleh Bapak Catur Wahyono selaku operator sistem menyatakan bahwa:

“Komputer disini kita gunakan untuk memastikan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan juga mengkonfirmasi wajib pajak yang sudah tersambung dengan database”. (Hasil wawancara 26 September 2022).

Kemudian pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Drive Thru memiliki standar pelayanan yang sudah jelas, seperti adanya syarat yang jelas dan juga jangka waktu penyelesaian layanan. Petugas juga mempunyai kemampuan yang handal dalam menggunakan alat bantu khususnya komputer dan printer, hal ini terbukti dengan sesuainya waktu pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan. Petugas juga baik dalam pengoperasian komputer maupun alat bantu lain, terbukti dengan mampunya petugas memperbaiki apabila terdapat kendala pada perangkat komputer dan alat bantu lainnya.

3. Responsiveness

Responsiveness atau ketanggapan merupakan bagaimana petugas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Drive Thru menanggapi keluhan maupun persoalan dari pelanggan serta bagaimana tindakan yang dilakukan petugas dengan cepat dan tepat. Dikarenakan petugas berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pelayanan tentunya terdapat adanya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang diterima. Baik itu sikap maupun reaksi dari petugas dalam menanggapi keluhan pelanggan itu merupakan upaya petugas dalam memberikan pelayanan yang baik.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Drive Thru ini sudah dapat dikatakan tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Iswanto selaku wajib pajak yang melakukan pembayaran pada layanan Drive Thru, menyatakan bahwa:

“Pas pertama kali kita datang langsung dimintai KTP yang tertera di STNK sama STNK asli mas”. (Hasil wawancara 26 September 2022).

Pendapat serupa juga diutarakan oleh bapak Irfan yang melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Drive Thru, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau ketanggapan petugas menurut saya tanggap sih mas, langsung dimintai STNK sama KTP. Langsung dilayani”. (Hasil wawancara 26 September 2022)

Sebelum adanya pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Drive Thru, masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor harus melakukan pembayaran lewat loket.

4. Jaminan atau Assurance

Adalah kepastian yang diberikan oleh petugas pelayanan kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat percaya terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas. Pada pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Drive Thru, jaminan pelayanan dapat diukur melalui ketepatan waktu pelayanan, biaya dalam pelayanan, jaminan legalitas yang sah.

Jaminan legalitas yang dihasilkan oleh SAMSAT Drive Thru Katang merupakan produk resmi, produk yang berfungsi sebagai dokumen bukti pembayaran yang sah. Terkait legalitas produk SAMSAT Drive Thru, Bapak Catur Wahyono selaku operator sistem menyatakan dalam wawancara bahwa:

“Bukti pembayaran PKB yang sah atau STNK yang dikeluarkan oleh SAMSAT Drive Thru tidak ada bedanya dengan pembayaran melalui SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling maupun pelayanan SAMSAT yang lain. Tentunya jelas sudah sah pembayaran tersebut”. (Hasil Wawancara 26 September 2022).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh bapak Puja Trileksana selaku petugas pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Drive Thru, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Dokumen permbayaran yang kita terbitkan mengenai PKB itu sama semua dengan pelayanan SAMSAT yang lainnya, sehingga tidak mungkin nantinya terjadi penagihan melalu pelayanan SAMSAT yang lain karena keaslian legalitas sudah terjamin”. (Hasil wawancara 26 September 2022).

Legalitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Drive Thru sudah jelas terbukti dengan dihasilkannya produk pelayanan oleh petugas seperti STNK tahunan Selain itu legaslitasnya juga dapat dibuktikan dengan berdasarkan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, didalam Perpres ini dikatakan bahwa Peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu, dimana salah satunya adalah Samsat Drive Thru.

5. Empati

Dalam pelayanan publik diartikan sebagai sebuah perasaan tulus atau sikap yang dimiliki oleh pemberi layanan didalam memberikan perhatian kepada para pelanggan dan berusaha untuk menempatkan diri sesuai dengan kondisi dan keadaan pelanggan sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan. Seperti pada pelayanan publik umumnya, petugas penyedia layanan harus memperlakukan pelanggan dengan baik serta memberikan perhatian yang cukup kepada pelanggan.

Berkaitan dengan sikap ramah dan sopan santun petugas pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui SAMSAT Drive Thru, bapak Iswanto selaku wajib pajak menyatakan bahwa:

“Saya rasa petugasnya kurang ramah mas, akan tetapi mereka tetap menjaga sopan santun dan melakukan pelayanan dengan baik. Mungkin karena antrian dan mereka juga harus fokus menjadi penyebabnya”. (Hasil wawancara 26 September 2022).

Bapak Dofir selaku wajib pajak juga mengutarakan hal yang sama dengan pendapat bapak Iswanto, yang menyatakan bahwa:

“Kalau untuk keramahan saya pikir masih kurang untuk petugasnya mungkin karena sudah lelah maupun karena ingin fokus, yang penting pelayanan tetap maksimal”. (Hasil wawancara 27 September 2022).

Selaras dengan pernyataan tersebut, bapak Sunaryo juga mengatakan bahwa:

“Masalah ramah atau tidaknya saya rasa kurang grapyak mas, tapi yang terpenting sopan dan santun, serta pelayanannya baik. Karena kita kan hanya sebentar juga dalam pembayaran”. (Hasil wawancara 26 September 2022).

Berdasarkan observasi dari keseluruhan penelitian, petugas SAMSAT Katang Drive Thru memiliki empati yang sudah baik terhadap pelanggan karena mengutamakan kepentingan pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari petugas SAMSAT Drive Thru yang melayani pelayanan sesuai dengan antrian wajib pajak yang melakukan pembayaran. Selain itu juga petugas tidak melakukan hal diskriminatif dengan menggolongkan wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran, diaman semua pelanggan wajib pajak dialayani dengan cara dan sikap yang sama.

Salah satunya terlihat dari pengalaman yang disampaikan oleh bapak Sunaryo selaku wajib pajak yang melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan Drive Thru, beliau menyatakan bahwa:

“Petugas dari drive thru tidak ada membedakan kalo antri dulu ya dapat tempat dulu, kalo antri dibelakang ya mendapat antrian belakang. Saya rasa sudah adil”. (Hasil wawancara 26 September 2022).

Selaras dengan pendapat yang diberikan bapak Sunaryo, bapak miftah yang juga sebagai wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan Drive Thru menyampaikan pendapat bahwa:

“Untuk pembedaan golongan atau diskriminasi saya rasa sudah tidak ada ya mas, petugasnya sekarang meskipun dengan pembayar pajak lain juga tetap memberlakukan pelayanan sesuai antrian. Yang mungkin biasanya jika kenal dengan petugas dilayani lebih dulu ini sudah tidak”. (Hasil wawancara 27 September 2022).

DISKUSI

1. Tangibles (berwujud)

Menurut Zeithaml dikutip Hardiyansyah (2011:46) dimensi Tangibles meliputi beberapa indikator diantaranya: penampilan petugas, kenyamanan tempat, kemudahan akses dalam pelayanan, kemudahan dalam pelayanan, kedisiplinan petugas, dan penggunaan alat bantu. Penampilan dan kemampuan sarana fisik (tempat pelayanan, ruang tunggu, tempat ibadah, toilet, dan sebagainya), perlengkapan peralatan yang diperlukan, serta penampilan pegawainya. Tangibles menjadi aspek aspek penting sebagai tolak ukur dalam pelayanan. Tentunya masyarakat akan menggunakan indera pengelihatan dan menilai suatu kualitas publik.

Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Drive Thru Pada Samsat Katang Kabupaten Kediri pada dimensi Tangibles berdasarkan data dari aspek-aspek yang telah digunakan dalam penelitian dapat dikatakan sudah berkualitas dan memenuhi aspek-aspek dari teori Tangibles. Akan tetapi masih ada hal yang harus diperhatikan pada aspek kedua yakni kenyamanan tempat pelayanan, kenyamanan tempat pelayanan Drive Thru pada SAMSAT Katang dirasa kurang nyaman bagi pelanggan dikarenakan apabila pada posisi antri panjang diberlakukan 2 baris dimana tempat terlalu sempit sehingga menimbulkan himpitan antar pelanggan. Akan tetapi jika dilihat dari aspek pertama dan ketiga sudah memenuhi aspek dari teori Tangibles.

Aspek pertama yaitu penampilan petugas. Petugas pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Drive Thru berpenampilan rapi dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, sehingga masyarakat wajib pajak yang akan melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Drive Thru merasakan kenyamanan dalam proses pelayanan.

Aspek ketiga yaitu kemudahan akses layanan, SAMSAT Katang Kabupaten Kediri ini sudah menyediakan layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Drive Thru yang memudahkan akses untuk masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dapat dilihat dari tempat pelayanan dimana SAMSAT Katang Kabupaten Kediri berada pada seberang kantor Kabupaten Kediri yang tentunya berlokasi pada tempat yang strategis dan berada pada pusat keramaian serta mudah dijangkau.

2. Reliability (Kehandalan)

Berdasarkan hasil penelitian, indikator kehandalan masuk dalam kategori sangat baik yang diuraikan dengan 4 (empat) instrumen yaitu: (1) Waktu penyelesaian layanan 1x5 (lima) menit, masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa petugas drive thru pajak kendaraan bermotor di Samsat Katang Kabupaten Kediri mampu menyelesaikan proses pelayanan yaitu 1x5 (lima) menit, meskipun biasa terjadi penyelesaian layanan lebih dari waktu yang telah ditetapkan (2) Layanan yang diberikan petugas sangat efektif, masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan petugas sangat efektif dalam proses penyelesaian pelayanan (3) Petugas terampil dalam proses penyelesaian pelayanan, masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa petugas layanan drive thru pajak kendaraan bermotor cekatan dalam menyelesaikan tugasnya (4) Petugas bertanggungjawab dalam proses pelayanan keluhan, masuk dalam kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa petugas layanan drive thru pajak kendaraan bermotor mampu dikatakan bertanggungjawab apabila adanya keluhan atau complain dari masyarakat pengguna layanan (wajib pajak) jika terdapat adanya masalah.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum dimensi kehandalan (Reliability) kualitas pelayanan *drive thru* pajak kendaraan bermotor di Samsat Katang Kabupaten Kediri maka dapat dikatakan sangat baik

3. Responsiveness

Berdasarkan hasil penelitian, indikator ketanggapan masuk dalam kategori sangat baik yang diuraikan dengan 4 (empat) instrumen yaitu: (1) Petugas memberikan perhatian atas keluhan secara akurat, masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa petugas *drive thru* pajak kendaraan bermotor di Samsat Katang Kabupaten Kediri memberikan perhatian yang baik kepada masyarakat pengguna layanan (wajib pajak) atas layanan keluhan secara tepat dan benar (2) Petugas merespon sangat baik dalam permohonan pelayanan, masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa petugas layanan *drive thru* pajak kendaraan bermotor memberikan respon yang sangat baik kepada masyarakat pengguna layanan (wajib pajak) dalam permohonan (3) Petugas cepat menanggapi aduan dalam permohonan pelayanan, masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa petugas layanan *drive thru* pajak kendaraan bermotor cepat menanggapi aduan dari masyarakat pengguna layanan (wajib pajak) dalam permohonan pelayanan (4) Petugas cermat membantu dalam permohonan pelayanan, masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa petugas layanan *drive thru* pajak kendaraan bermotor cermat membantu masyarakat pengguna layanan (wajib pajak) saat berlangsung permohonan pelayanan.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum dimensi ketanggapan (Responsiveness) kualitas pelayanan *drive thru* pajak kendaraan bermotor di Samsat Katang Kabupaten Kediri maka dapat dikatakan sangat baik

4. Assurance

Berdasarkan hasil penelitian, indikator jaminan masuk dalam kategori sangat baik yang diuraikan dengan 4 (empat) instrumen yaitu: (1) Penggunaan layanan meringankan dan tidak menyita waktu bekerja, masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan layanan *drive thru* pajak kendaraan bermotor di Samsat Katang Kabupaten Kediri sangat meringankan dan tidak menyita banyak waktu seperti jam kerja pengguna layanan (wajib pajak) sehingga sangat tepat digunakan oleh mereka yang memiliki jam sibuk selain itu layanan tersebut sangat fleksibel maksudnya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna layanan (wajib pajak) (2) Petugas memberikan jaminan kepastian biaya, masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa petugas telah memberikan jaminan biaya yang pasti, sesuai dengan tarif yang telah ditentukan tanpa adanya pungutan biaya diluar pembayaran pajak kendaraan bermotor layanan *drive thru* yang harus ditanggung masyarakat pengguna layanan (wajib pajak) (3) Pengawasan pihak kepolisian, pihak PT. Jasa Raharja dan UPT Bapenda Kediri Kediri, masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa layanan *drive thru* pajak kendaraan bermotor diawasi secara langsung oleh pihak kepolisian, PT. Jasa Raharja dan UPT Bapenda Kediri (4) Mendapatkan jaminan hukum atas validitas data pribadi pemilik kendaraan bermotor, masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa layanan *drive thru* pajak kendaraan bermotor di Samsat Katang Kabupaten Kediri memelihara sangat baik validitas data pribadi pemilik kendaraan bermotor serta terdapat pula kepastian hukum yang mengaturnya.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum dimensi jaminan (Assurance) kualitas pelayanan *drive thru* pajak kendaraan bermotor di Samsat Katang Kabupaten Kediri maka dapat dikatakan sangat baik.

5. Emphaty

Berdasarkan hasil penelitian, indikator ketanggapan masuk dalam kategori sangat baik yang diuraikan dengan 3 (tiga) instrumen yaitu: (1) Petugas melayani dengan sopan dan santun, masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa petugas *drive thru* pajak kendaraan bermotor di Samsat Katang Kabupaten Kediri melayani masyarakat pengguna layanan (wajib pajak) dengan sikap sopan dan santun (2) Petugas melayani dengan sikap ramah, masuk dalam kategori buruk, hal ini menunjukkan bahwa petugas layanan *drive thru* pajak kendaraan bermotor belum bisa

melayani masyarakat pengguna layanan (wajib pajak) dengan sikap yang ramah dan berkesan menyenangkan (3) Petugas melayani dengan tidak deskriminatif (membeda-bedakan), masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa petugas layanan drive thru pajak kendaraan bermotor melayani masyarakat pengguna layanan (wajib pajak) dengan sikap yang seimbang tidak membedakan berdasarkan status sosial dan tidak mendahulukan pihak tertentu.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum dimensi empati (Emphaty) kualitas pelayanan drive thru pajak kendaraan bermotor di Samsat Katang Kabupaten Kediri maka dapat dikatakan sangat baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Drive Thru pada Samsat Katang Kabupaten Kediri melalui 5 dimensi kualitas pelayanan yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Dimensi Tangibles yang dapat dilihat melalui aspek penampilan pegawai, akses lokasi samsat Drive Thru sudah baik, sedangkan pada aspek kenyamanan tempat pelayanan kurang nyaman. Lalu untuk kondisi alat bantu dan juga kedisiplinan petugas sudah baik. Secara keseluruhan dimensi Tangibles (berwujud) kualitas pelayannya buruk
2. Dimensi Reliability yang dapat dilihat melalui aspek kemampuan dan keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu layanan, dan juga kecermatan petugas dalam melayani sudah baik. Dimensi Reliability (kehandalan) sudah memberikan kualitas pelayanan yang baik
3. Dimensi Responsiveness yang dapat dilihat melalui aspek kecepatan petugas dalam melayani pengunjung sangatlah cepat. Kemudian petugas juga merespon pelanggan yang datang dengan cepat serta sudah memberikan layanan yang tepat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pada dimensi Responsiveness (ketanggapan) sudah memberikan kualitas pelayanan yang baik
4. Dimensi Assurance yang dapat dilihat melalui aspek tepat waktu, petugas sudah tepat waktu dalam memberikan pelayanan karena sudah sesuai jadwal dan juga jam pelayanan yang sudah ditetapkan. Sedangkan dari aspek jaminan biaya dan juga legalitas sudah diterapkan dengan baik. Secara keseluruhan dimensi Assurance (jaminan) sudah memberikan kualitas pelayanan yang baik
5. Dimensi Emphaty yang dapat dilihat melalui aspek sikap petugas dalam melakukan pelayanan terhadap pelanggan dengan sopan dan santun sudah sangat baik, akan tetapi dari segi aspek keramahan belum memberikan kualitas layanan yang diinginkan oleh sebagian pelanggan. Secara keseluruhan dari dimensi Emphaty (empati) kualitas pelayanan buruk

DAFTAR PUSTAKA

- A, Taufiqurokhman & Satispi, E. (2018). Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. UMI PRESS.
- Alisman, Suharmi, I., & Nurhayani, F. (2018). Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Nagan Raya. *Ekonomi Dan Bisnis*, 4, 102–110.
- Atmaja, J. (2018). Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Pada Bank BJB. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 49–63.
- Dewa, C. B. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Penjualan Jasa Grabcar Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Wisatawan di Yogyakarta). *Perspektif*, 16(1), 1–6.
- Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Gava Media.
- Mahrizal. (2018). Efektivitas Dan Laju Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Aceh Barat. 4, 158–169.
- Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik.

- Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik. Alfabeta, cv.
- Pringgo, Y. (2015). Kualitas Pelayanan Perpanjangan Pajak Melalui Layanan Publik STNK Keliling Di Gresik. 3, 1–18.
- Ratminto & Septi, A. (2012). Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar.
- Sinambela, L. P. (2008). Reformasi Pelayanan Publik. PT. Bumi Aksara.
- Sinambela, L. P. dkk. (2011). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Cetakan 27). Alfabeta.
- Tjiptono, F., & Chandra. (2011). Service Quality and Satisfaction (Edisi 3). CV Andi Offset.
- Tjiptono, F., & Chandra. (2016). Service, Quality dan Satisfaction (Edisi ke 4). CV Andi Offset.
- Utami, M. F., Ansari, M. I., Tahir, M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (n.d.). Kualitas Pelayanan Drive Thru Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Pembantu Pettarani Upt (Unit Pelaksana Teknis) Pendapatan Wilayah Makassar. 3.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG TANGGUH SEMERU WANI JOGO SUROBOYO DI RT 06 DAN RT 07 RW 02 KELURAHAN KEPUTIH KOTA SURABAYA

Muhammad Lazuardi Farras Ar Rasyid¹, Dr. Diana Hertati, M. Si²

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat e-mail : lazuardifarras.ar@gmail.com

*Corresponding author : diana.adneg@gmail.com

Abstrak

Histori Artikel

Submitted

20 Juli 2023

Reviewed

21 Juli 2023

Accepted

21 Juli 2023

Published

29 September 2023

Penelitian ini didasarkan oleh fenomena program pemerintah Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo di RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya yang berhasil meraih Juara I Lomba Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo Periode V oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Polrestabes Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat melalui program Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya. Penelitian ini mengacu pada pembaruan informasi yang diperoleh dari situasi di lapangan dengan berpedoman pada teori Bentuk Partisipasi Masyarakat menurut Huraerah. Dalam hal ini terdapat lima sasaran

kajian yaitu: (1) Partisipasi Buah Pikiran; (2) Partisipasi Tenaga; (3) Partisipasi Harta Benda; (4) Partisipasi keterampilan dan Kemahiran; (5) Partisipasi Sosial. Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1) Dari sisi partisipasi buah pikiran dapat dinyatakan sudah baik; 2) Dari sisi partisipasi tenaga dapat dinyatakan sudah baik; 3) Dari sisi partisipasi harta benda dapat dinyatakan sudah baik; 4) Dari sisi partisipasi keterampilan dan kemahiran dapat dinyatakan sudah baik; 5) Dari sisi partisipasi sosial dapat dinyatakan sudah baik.

Kata Kunci: Covid-19, Kampung Tangguh, Implementasi Kebijakan, Partisipasi Masyarakat

Abstract

This research is based on the phenomenon of the government program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo in RT 06 and RT 07 RW 02 Keputih Village, Surabaya City, which won 1st place in the Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo Period V Competition by the Surabaya City Government and Surabaya City Police. The purpose of this study was to determine and describe community participation through the Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo program in RT 06 and 07 RW 02 Keputih Village, Surabaya City. This type of research is descriptive qualitative using data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. This research was conducted in RT 06 and RT 07 RW 02 Keputih Village, Surabaya City. This research refers to updating the information obtained from the situation in the field by referring to the theory of Forms of Community Participation according to Huraerah. In this case there are five study targets, namely: (1) Ideast Participation; (2) Labor Participation; (3) Property Participation; (4) Skills and Proficiency Participation; (5) Social Participation. The research results obtained are: 1) In terms of participation of Ideas, it can be stated that it is good; 2) In terms of labor participation, it can be stated that it is good; 3) In terms of property participation, it can be stated that it is good; 4) In terms of participation of skills and skills, it can be stated that it is good; 5) In terms of social participation, it can be stated that it is good.

Keywords: *Covid-19, Kampung Tangguh, Policy Implementation, Public Participation*

PENDAHULUAN

Kualitas dan masa depan suatu bangsa ditentukan oleh tiga hal penting, yaitu pendidikan, kesehatan dan demokrasi. Suatu bangsa yang terdidik, sehat dan demokratis, memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan keberadaan dan eksistensinya, namun hal itu berbanding terbalik apabila tiga pilar tersebut diabaikan oleh negara. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1990, pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Tahun 2004, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan SKN suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu saling mendukung, guna menjamin kesehatan yang setinggi- tingginya sebagai perwujudan kesehatan umum seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H Ayat (1) berbunyi, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Masalah kesehatan merupakan salah satu bentuk pemasalahan yang harus ditangani baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Mengingat pentingnya kesehatan tersebut, Undang-Undang 36 Tahun 2009 memberikan arah sebagai berikut:

1. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus di wujudkan sesuai dengan cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan Nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang ada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Surabaya merupakan salah satu daerah dengan positivity rate yang rendah di Provinsi Jawa Timur. Sehingga tentu tidak terlepas dari peran serta partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Dokumen Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 keterlibatan aktor nonpemerintah dapat menjadi salah satu kunci dalam menutup kesenjangan yang terjadi. Kontribusi aktor non-pemerintah juga telah menjadi sumberdaya yang dapat digerakan yang dapat menjadi peluang dan mengatasi sejula tantangan di lapangan. Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga telah mengidentifikasi sejumlah aktor non-pemerintah menjadi substitusi (tambahan) sumberdaya dalam situasi krisis yang sebut sebagai Pendekatan Pentahelix. Pentahelix merupakan salah satu pendekatan yang digunakan pemerintah untuk melibatkan 4 unsur non-pemerintah yang lain dalam percepatan penanganan COVID-19, yaitu; masyarkat, akademisi, media dan lembaga usaha (swasta).

Peran serta masyarakat dalam situasi krisis menjadi sumberdaya utama dalam penanganan respon khususnya sebagai perespon awal. Berbagai bentuk kontribusi dan inisiatif yang muncul dimasyarakat menjadi modal sebagi bagian dari penanganan respon COVID-19 dilingkungan masyrakat. Keterlibatan masyarakat dalam penangan COVID-19 dapat dimanivestasikan melalui berbagai bentuk, diantaranya kegiatan berbasis komunitas/masyarakat, relawan kemanusiaan maupun organisasi masyarakat sipil (OMS). Sebagai sumberdaya tambahan, kontribusi masyarakat ini juga dapat diwadahi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik di pusat maupun didaerah dan dapat dikelola berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Keterlibatan ini dapat mengakomodir baik secara perorangan ataupun kelembagaan dengan mempertimbangkan pengalaman, keahlian, maupun mobilisasi sumberdaya yang dimiliki. Gugus Tugas Pecepatan COVID-19, guna melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19 ini.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak dikutip Huraerah, (2008:102-103) Jenis-jenis partisipasi masyarakat itu sendiri yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran
2. Partisipasi tenaga
3. Partisipasi harta benda
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran
5. Partisipasi sosial

Menurut Winardi dikutip oleh Sitaro et al., (2017:4) mengemukakan bahwa secara formal partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan fungsi-fungsi dalam proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan hal itu. Sementara, Beal dikutip dari Mardikanto & Soebiato (2019:81) berpendapat bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*). Hal ini ditunjukkan dengan mulai berdayanya entitas tindakan preventif oleh masyarakat di kampung-kampung, inisiatif masyarakat timbul sebagai respon atas upaya pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Dikutip dari Raharjo dalam Rofiq (2018:6) konsep partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat atau sekelompok masyarakat dalam program-program pemerintah. Program tersebut dapat dilaksanakan dengan cara persuasif atau mobilitatif, misalnya dalam hal pembangunan prasarana produksi, pemasaran, perhubungan dan sosial di pedesaan melalui proyek-proyek Instruksi Presiden, gotong royong, dan swadaya masyarakat dengan pancingan subsidi dari pemerintah pusat dan daerah, pemberian suara dalam pemilu, kepatuhan membayar pajak, dan sebagainya.

Program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dalam pelaksanaannya sudah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 Di Kota Surabaya Pasal 36 Ayat 1-2 yang berisi:

1. Dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), masyarakat berperan aktif membentuk “kampung wani” ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang terdiri dari :

- a. Satgas Wani Sehat;
- b. Satgas Wani Sejahtera;
- c. Satgas Wani Jogo; dan
- d. Satgas Wani Ngandani.

2. “Kampung wani” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain :

- a. memantau dan mengawasi wilayah setempat;
- b. memberikan pendapat, saran dan masukan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
- c. melaporkan apabila mengetahui adanya ditemukan kasus terindikasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menurut Conyers dikutip Jaya (2017:7) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- 3) Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo di RT 07 dan 06 RW 02 Kelurahan Keputih berhasil meraih Juara 1 Lomba Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo Periode V (tanggal 01 sampai dengan 03 Juli 2020). Kemenangan ini langsung menerima piagam penghargaan dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Jhonny Eddizon Isir. Penghargaan tersebut juga diterima langsung oleh ketua RT 07, David Noor Mubarak, di Polrestabes Surabaya, Sabtu (11/07/2020), merupakan salah satu bentuk mencegah

penyebaran COVID-19 di daerahnya. Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo di RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo sangat aktif dalam melakukan Tindakan dan upaya preventif dan mengimplementasikan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 Di Kota Surabaya Pasal 36 Ayat 1-2 di daerahnya, dengan sudah terstrukturnya Satgas Wani COVID-19. Melihat beberapa observasi singkat yang dilakukan oleh peneliti ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif peran partisipasi masyarakat terhadap adanya program atau kebijakan terbaru dari Pemerintah ini yaitu Program Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Hal ini perlu untuk dikaji lebih dalam untuk mengetahui dan menggambarkan jenis partisipasi yang dilakukan oleh warga RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat di RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam menanggulangi pandemik COVID-19 peneliti berkeinginan untuk mempelajari lebih lanjut bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan mengadakan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan, menganalisa dan mengklarifikasi penelitian dengan teknik wawancara atau interview maupun secara observasi di tempat atau lokus penelitian. Pelaksanaan pendekatan deskriptif tidak hanya sebatas pada pengumpulan data dan penyusunan data saja, melainkan juga pada proses analisa data serta interpretasi data tersebut.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti guna memperoleh data yang akurat. Agar memperoleh data yang akurat atau mendekati kebenaran sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian ini di RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya.

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, sehingga tidak akan terjadi bias terhadap data yang diambil, serta untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan dalam penelitian ini. Menurut Pasaribu dan Simanjuntak dikutip Huraerah, (2008:102-103) Jenis-jenis partisipasi masyarakat itu sendiri yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran
2. Partisipasi tenaga
3. Partisipasi harta benda
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran
5. Partisipasi sosial

Sumber data menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2017:157), bahwasanya penelitian kualitatif merupakan kata-kata dan tindakannya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Informan Kunci (Key Person)
2. Tempat dan Peristiwa
3. Dokumen

Jenis data dalam suatu penelitian sangat berguna dan penting untuk dilakukan dengan suatu pemilihan, sehingga nantinya dapat mengetahui langkah-langkah selanjutnya yang akan ditetapkan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada. Jenis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data primer
2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2018:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilihat dengan berbagai cara, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara atau interview

2. Pengamatan atau observasi
3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2019:330) dengan tahapan analisis data tersebut sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing And Verifying*)

Dalam pengujian keabsahan data, diperlukan adanya teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan tersebut didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018:270), meliputi :

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)
2. *Transferability* (Keteralihan)
3. *Dependability* (Standar Ketergantungan)
4. *Confirmability* (Kepastian)

HASIL

a. Partisipasi Buah Pikiran

Fokus pertama dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Dalam penelitian ini, bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan warga berupa ide atau gagasan, kritik dan saran yang disampaikan dalam sebuah pertemuan atau rapat. Pertemuan atau rapat digunakan warga untuk memusyawarahkan dalam menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo.

Hasil pengamatan peneliti dalam pengumpulan data ditemukan bahwa warga RT 06 dan RT 07 dalam menyampaikan ide atau gagasan, saran, dan kritik melalui beberapa pertemuan atau rapat antara lain rapat formal dan pertemuan antar warga. Rapat formal dilaksanakan secara periodik setiap tiga bulan sekali yang dihadiri warga baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Setiap akan dilaksanakan rapat triwulan sekretaris RT akan membuat dan menyebarkan undangan kepada setiap KK yang berisi tentang waktu dan tempat pelaksanaan. Rapat tersebut membahas tentang program kerja, pelaporan uang kas RT, dan gagasan yang muncul pada pertemuan antar warga. Notulensi rapat triwulan ditulis oleh sekretaris RT selanjutnya digandakan dan disebar ke setiap rumah warga agar warga yang berhalangan hadir dapat mengetahui putusan dalam rapat tersebut.

Terkait dengan penyampaian gagasan atau ide, peneliti bertanya kepada selaku key informan ketua Satgas Kampung Tangguh RT 06 dan RT 07, Bapak Yunus dalam pernyataannya beliau menjelaskan sebagai berikut :

“...Ada mas, itu kan masih suasana covid ya mas, terus kampung tangguh kan diinisiasi oleh Pemkot terus jadi lomba yang diselenggarakan oleh jajaran Polrestabes Surabaya. Karena ini kita butuh persiapan, nah persiapan ini kita harus memahami dulu komponen Program Kampung Tangguh ini. Jadi kita mewakili kelurahan Keputih disini. seperti struktur satgas covidnya, lalu sembako dan program kalau ada yang terkena covid, lalu SOP juga yang kita siapkan...”

Peneliti juga bertanya kepada beberapa informan, antara lain Bapak Bayu selaku Ketua RT 07 dalam pernyataannya beliau menjelaskan sebagai berikut :

“...Jauh sebelum adanya perlombaan Program Kampung Tangguh, semenjak covid mewabah kita sebagai warga disini ya insyaallah sangat tanggap. mulai dari penyemprotan disinfektan itu jauh mas, sebelum program kampung tangguh, termasuk gerbang disinfektan. lalu untuk isolasi mandiri jadi dari kita sendiri sebagai warga sangat antusias, katakan ada tetangga kita yang kena ya tidak usah dikomando, kita langsung mengirim kebutuhan logistic...”

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada key informan lain diantaranya yaitu Bapak Made selaku ketua RT 06, dalam pernyataannya beliau menjelaskan hal serupa sebagai berikut:

“...Ya dari warga (ide-ide masukan itu). Jadi intinya warga itu ingin kampung ini aman bagaimana cara memproteksi nah itu masukan dari warga semuanya. hal-hal yang dibahas terkait dengan

kampung tangguh itu adalah persiapan untuk mengantisipasi terkait dengan COVID, kesiapan warga, kesedian warga untuk membantu, kalau misalnya ada warga yang kena COVID itu bagaimana warga membantu, kemudian mengumpulkan dana, atau membelikan makanan kemudian mengantarnya dan sebagainya...”

Dari hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran berupa keterlibatan warga dalam penyampaian ide, saran dan kritik mengenai program kerja dan kegiatan program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo yang disampaikan melalui rapat persiapan Program Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo maupun pertemuan informal antar warga mengenai upaya-upaya preventif dalam menanggulangi Covid.

b. Partisipasi Tenaga

Fokus kedua dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga. Partisipasi tenaga merupakan partisipasi yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang sering dilakukan oleh warga RT 06 dan RT 07, hal itu dikarenakan partisipasi dalam bentuk tenaga tidak membutuhkan modal yang begitu sulit dan banyak. Dalam penelitian ini, bentuk partisipasi tenaga warga RT 06 dan RT 07, pada sasaran kajian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Made selaku key informan Ketua RT 06 sebagai berikut :

“...kebanyakan itu gini, misalkan ada warga yang kena itu akan diinformasikan melalui grup WA. kemudian ibu ibu itu berkomunikasi siapa yang membantu hari ini?, besok siapa?, kemudian lusa siapa dan sebagainya. Yang pagi siapa yang siang siapa. Nah, jarang sih yang dikumpulkan semua. Jadi per personel jadi giliran saya atau keluarga saya, jadi kami yang mengantarkan kerumah itu kan dirumah itu sudah ada tempat penitipan makanan atau pakai gojek atau apa gitu kita pesan tolong diantar ke alamat ini...”

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Bayu selaku warga RT 07, yang menyatakan bahwa :

“...Jauh sebelum adanya perlombaan Program Kampung Tangguh, semenjak covid mewabah kita sebagai warga disini ya insyaallah sangat tanggap. mulai dari penyemprotan disinfektan itu jauh mas sebelum program kampung tangguh, termasuk gerbang disinfektan. lalu untuk isolasi mandiri jadi dari kita sendiri sebagai warga sangat antusias, katakan ada tetangga kita yang kena ya tidak usah dikomando, kita langsung mengirim kebutuhan logistik...”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Pak Yunus selaku key informan dan Ketua Satgas Kampung Tangguh menambahkan dalam pernyataannya sebagai berikut:

“...ketika ada warga yang kena itu juga warga saling membantu mas. Itu juga sistem satu pintu disinfektan kita buat automatic ya mas begitu orang lewat semprot sendiri. Partisipasinya kita atur dengan pemberian disinfektan dikelola oleh warga secara bergantian mengontrol sesuai jadwal...”

Dari beberapa hasil wawancara peneliti di atas, dapat diperoleh kesimpulan terkait partisipasi masyarakat pada hasil temuan fokus yang kedua, dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat RT 06 dan RT 07 dalam bentuk tenaga yaitu dalam kegiatan Kontroling terjadwal pada penjagaan satu pintu, kerja bakti yang dilakukan secara terjadwal dan saling bergotong royong apabila ada warga yang terdampak pandemi.

c. Partisipasi Harta Benda

Fokus ketiga dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk harta benda. Partisipasi dalam bentuk harta benda merupakan partisipasi orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau masyarakat pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya. Warga menyumbangkan harta benda yang dimiliki untuk mendukung kegiatan, pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan RT 06 dan RT 07.

Pada sasaran kajian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Made selaku key informan Ketua RT 06 sebagai berikut :

“...Harta benda mungkin dalam hal ini dalam sisi finansial masuk ya, terus yang kedua beberapa warga itu mengumpulkan dana untuk kegiatan ini. Lalu menyediakan oksigen ada di masjid ada juga ada di beberapa misal ada warga yang punya nanti menginformasikan saya ada oksigen nih nanti yang membutuhkan silahkan. Rumah Isolasi disitu kan ada pos di belakan ada rumah itu kita

arahkan kesana tapi kebanyakan warga itu dirumah sendiri...”

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Yunus selaku key informan sebagai Ketua Satgas Kampung Tangguh sebagai berikut :

“...Sumbangan banyak mas, bisa berupa uang, sembako, jadi awal kena itu warga gaboleh keluar mas yg terinfeksi, jadi makannya melalui RT. Untuk dana campur mas kas RT, Kas Masjid dan swadaya masyarakat. dan memang warganya aktif mas disini Misalnya ya ada swalayan disinfektan itu masyarakat, bukan dari pemerintah anggarannya mas, itu dari kita sendiri. Terus masjid itu menyediakan sejumlah alat kesehatan, oksigen, mereka beli untuk persiapan warga yang terkena. lalu ketika ada warga yang kena itu juga kepace mas. Itu juga sistem satu pintu disinfektan kita buat automatic ya mas begitu orang lewat semprot sendiri. Partisipasinya kita atur dengan pemberian disinfektan dikelola oleh warga...”

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Bayu selaku warga RT 07, yang menyatakan bahwa :

“...Kita memberi bantuan kepada tetangga yang terdampak, apabila ada tetangga yang terkena musibah katanlah dia positif isolasi mandiri, tetangga secara mandiri sudah mengirimkan logistik seperti sembako, makanan, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan. Kita selalu koordinasi melalui Pesan Teks maupun telepon. Anggaran pun lebih banyak swadaya masyarakatnya mas, kalaupun kas RT itupun untuk perlengkapan. Oksigen APD dll Keberatan pun saya rasa 100% tidak ada mas...”

Dari beberapa hasil wawancara peneliti diatas, dapat ditarik kesimpulan terkait Partisipasi masyarakat pada hasil temuan fokus yang ketiga dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat RT 06 dan RT 07 dalam bentuk harta benda berupa Bantuan Logistik berupa sembako, lalu konsumsi permakanan rutin terhadap warga terdampak dan barang-barang yang dibutuhkan untuk mendukung Program Kampung Tangguh, serta iuran rutin maupun iuran sumbangan tidak tetap swadaya masyarakat sendiri.

d. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran

Fokus keempat dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keterampilan dan kemahiran. Partisipasi keterampilan dan kemahiran merupakan partisipasi yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. Pada sasaran kajian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Made selaku key informan Ketua RT 06 sebagai berikut :

“...kalau di RT 07 ada kalau disini ada paramedis yang membantu misalkan bagaimana penanganannya kemudian saran-sarannya dan sebagainya. misal memberikan APD seperti itu Untuk tempat ada mas disebelas pos untuk rumah isolasi yang digunakan oleh warga mas...”

Bapak Bayu selaku Ketua RT 07 juga memberikan pernyataan yang sama sebagai berikut:

“...Warga juga ada yang bekerja sebagai dokter yang ikut membantu pengawasan suspek covid mas. Itu ada warga saat itu menyediakan rumahnya yang kebetulan kosong disediakan untuk isolasi ataupun di depan pos ya mas, tapi umumnya warga yang terkena lebih memilih dirumah sendiri untuk mengisolasi dirinya...”

Kemudian Bapak Anang selaku warga RT 06 memberikan pernyataan sebagai berikut:

“...ada warga yang memang bekerja sebagai anggota ya mas jadi turut andil untuk sistem keamanannya apalagi pas warga memang rumah kosong karena mungkin di rs ya mas sat kena covid...”

Dari beberapa hasil wawancara peneliti diatas, dapat ditarik kesimpulan terkait Partisipasi masyarakat pada Hasil temuan fokus yang keempat dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat RT 06 dan RT 07 dalam bentuk keterampilan dan kemahiran adalah banyak warga yang menggunakan keterampilan maupun kemahiran melalui pekerjaan warga itu sendiri seperti Perawat, Dokter, serta Aparatur Keamanan Negara Kepolisian dalam membantu Program Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo.

e. Partisipasi Sosial

Fokus kelima dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk sosial. Partisipasi sosial merupakan partisipasi yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban. Pada sasaran kajian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Made selaku key informan Ketua RT 06 sebagai berikut :

“...Karena pada waktu itu covid orang takut keluar, tapi yang jelas kita selalu menyarankan supaya menjaga kebersihan dirumah jadi lingkungan kemudian menghimbau untuk jaga jarak kalopun

keluar harus berjemur misalkan. sebisa mungkin pun aktivitas sosial diminimalisir. Cuma walaupun sangat minim tapi bagaimana proses pelaksanaan itu bisa berjalan ya dengan cara seperti itu. Warga disini itu sebenarnya warga yang ringan tangan. pada saat mereka itu punya waktu RT butuh bantuan warga selalu membantu kecuali apabila warga ada kesibukan lain, kemudian yang ke dua begini, partisipasi warga itu kawasan ini adalah rumah kita kalau bukan kita yg menjaga ya siapa lagi. jadi bagaimanapun kawasan ini harus membanggakan. dengan tujuan seperti itu maka partisipasi masyarakat akan terbangun. Karena ada rasa saling menjaga, empati dan simpati pada antar warga...”

Bapak Bayu selaku Ketua RT 07 juga memberikan pernyataan yang sama sebagai berikut:

“...Jadi Informasi itu kita dapatkan dari kelurahan ya mas, ada warga yang terdampak atau yg kita sebut juga mungkin suspek positif, dari situ warga bergerak ada yang ditunjuk sebagai verifcator apakah benar, terus kemudian kita konfirmasi kepada pak Yunus selaku ketua SATGAS, nanti beliau mendelegasikan ke warga melalui pengiriman bantuan makanan, obat-obatan dll, serta kita menyediakan emergency seperti oksigen dll...”

Dari beberapa hasil wawancara peneliti diatas, dapat ditarik kesimpulan terkait Partisipasi masyarakat pada hasil temuan fokus yang kelima dapat dinyatakan bahwa kegiatan Program Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo warga sangat antusias bergotong royong dan bahu-membahu dalam kesuksesan program tersebut.

DISKUSI

Dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah di paparkan sebelumnya yaitu untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat melalui program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya maka peneliti menggunakan teori dari Pasaribu dan Simanjuntak dikutip Huraerah, (2008:102-103) mengenai kelima bentuk partisipasi masyarakat itu sendiri yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi buah pikiran merupakan salah satu bentuk partisipasi yang diberikan oleh partisipan dalam anjang sana, pertemuan atau rapat (Huraerah 2008:102). Bentuk dari partisipasi tersebut dapat berupa ide atau gagasan, saran dan kritik yang disampaikan dalam sebuah pertemuan. Warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih telah melaksanakan partisipasi buah pikiran yang disampaikan melalui pertemuan formal maupun informal yang berupa rapat persiapan sebelum lomba, rapat evaluasi pelaksanaan, dan rutin mengadakan pertemuan antar warga.

Dalam rapat formal yang dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dilaksanakan sebelum pelaksanaan program untuk membahas persiapan dan perlengkapan yang dibutuhkan, pelaporan program kerja dan struktur pengurus program Kampung Tangguh serta ide dan gagasan yang muncul dalam pertemuan warga.

Sedangkan dalam pertemuan informal antar warga merupakan pertemuan yang bersifat fleksibel yang kemudian disampaikan dalam rapat formal agar warga yang lain dapat memberikan buah pikiran mereka sebagai bentuk tanggapan. Hal tersebut juga merupakan salah satu unsur pokok dalam partisipasi menurut Slamter yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebianto (2015:91) yaitu adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat juga merupakan bentuk informasi mengenai kapan dan dalam bentuk apa masyarakat dapat atau dituntut untuk berpartisipasi.

Menurut hasil wawancara dan observasi peneliti di lokasi penelitian, partisipasi buah pikiran dapat dikatakan sudah berpartisipasi, karena terdapat wadah berupa pertemuan dan

kesempatan berpartisipasi untuk warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih dalam menyampaikan buah pikirannya.

2. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga merupakan bentuk partisipasi yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya (Huraerah, 2008:102). Bentuk partisipasi tenaga yang dilakukan oleh warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih meliputi penjagaan pos dengan system terjadwal secara satu pintu, memberikan bantuan sembako dan kebutuhan lainnya kepada warga terdampak, serta kerja bakti yang rutin karena telah menjadi sebuah kebiasaan. Penjagaan pos dengan system yang terjadwal bagi masing-masing warganya adalah bentuk upaya preventif dalam upaya pencegahan Covid-19 dari warga luar pemukiman, dengan adanya bilik disinfektan saat melalui system satu pintu, lalu mengontrol dan mendata warga luar yang berkunjung dengan selalu menerapkan protocol Kesehatan, dan ketersediaan tempat penitipan barang merupakan bentuk partisipasi tenaga warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih, lalu juga berupa kerja bakti yang dilakukan satu bulan sekali juga kerja bakti yang bersifat incidental atau sewaktu-waktu. Hal tersebut pula merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasinya terhadap pengelolaan sampah, seperti yang jelaskan oleh Sumarto yang dikutip oleh Prastiyantoro (2017:22) salah satunya adalah persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan bersih berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut hasil wawancara dan observasi mengenai partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dapat dikatakan sudah berpartisipasi. Karena bentuk partisipasi tenaga sudah terlaksana secara rutin.

3. Partisipasi Harta Benda

Partisipasi harta benda merupakan bentuk partisipasi yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya (Huraerah, 2008:102). Bentuk partisipasi harta benda yang diberikan oleh warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih berupa kesediaan warga untuk rumahnya dijadikan rumah isolasi bagi warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, adanya bantuan perlengkapan yang dibutuhkan dalam mendukung program Kampung Tangguh berupa oksigen, masker, hand sanitizer dan APD oleh masjid melalui sumbangan warga, serta iuran secara swadaya oleh masyarakat digabungkan dengan kas RT melalui bantuan sembako dan kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh warga yang terdampak. Sebagai bentuk komitmen warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih dalam mendukung program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo oleh Pemerintah Kota Surabaya juga memanfaatkan lahan kosong disalah satu rumah warga untuk dijadikan sebagai rumah isolasi dan lumbung pangan. Dengan adanya dua tempat tersebut memudahkan dalam melaksanakan kegiatan program Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di wilayah tersebut. Hal tersebut juga salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasinya menurut Sulaiman yang dikutip oleh Huraerah (2008:103) yaitu partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana, dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lokasi penelitian, partisipasi warga dalam bentuk harta benda dapat dikatakan sudah berpartisipasi. Hal tersebut terlihat dari kerelaan warga untuk menyisihkan harta benda melalui hal yang disebutkan diatas.

4. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran

Partisipasi keterampilan dan kemahiran merupakan bentuk partisipasi yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri (Huraerah, 2008:102). Bentuk partisipasi keterampilan dan kemahiran yang diberikan warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih berupa adanya partisipasi warga dengan memanfaatkan kemahiran profesi dalam mendukung program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo. Kemampuan warga RT 06 dan RT 07 juga dapat dilihat dalam mendukung program berawal dari banyaknya informasi pencegahan melalui media daring, radio, maupun televisi, serta rapat yang diadakan oleh Kelurahan Keputih sendiri, kemudian warga membagikan ilmunya kepada warga yang lain sehingga warga yang lain dapat memahami dan mendukung program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo. Hal tersebut juga salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasinya menurut Plumer dikutip dalam Suryawan (2004:27) berpendapat, beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lokasi penelitian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk keterampilan dan kemahiran dapat dikatakan sudah berpartisipasi. Hal tersebut terlihat dari kegiatan dan hasil yang didapat dalam program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo sehingga dapat menjadi juara lomba KTS Periode V yang diadakan jajaran pemerintah Kota Surabaya.

5. Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial merupakan bentuk partisipasi yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban (huraerah, 2008:102). Bentuk partisipasi sosial yang diberikan warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih adalah keikutsertaan warga menjadi pengurus dan anggota satgas Kampung Tangguh di wilayahnya. Seluruh kegiatan dalam Satgas Kampung Tangguh dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah disusun oleh Satgas Covid Nasional hingga tingkat Kota Surabaya, sehingga Pengurus dan anggota Satgas Kampung Tangguh mendapat dukungan penuh dari Kelurahan Keputih. Adanya Satgas Kampung Tangguh juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasinya menurut Sulaiman yang dikutip oleh Huraerah (2008:103) Partisipasi representative dengan memberikan kepercayaan dan mandate kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia .

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian, partisipasi masyarakat dalam bentuk sosial dapat dikatakan sudah berpartisipasi. Hal tersebut terlihat dari struktur Satgas Kampung Tangguh di wilayah RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan temuan data di lapangan yang telah di jelaskan atau di paparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat diuraikan serta disimpulkan mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan teori Huraerah (2008:103), bahwa :

1. Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi Buah Pikiran warga di RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya dalam pelaksanaan program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo dapat dikatakan sudah berpartisipasi. Warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya

telah berpartisipasi dalam mengikuti pertemuan formal berupa rapat persiapan hingga evaluasi dan pertemuan antar warga dengan memberikan ide atau gagasan, saran dan kritiknya, walaupun dalam rapat formal ada beberapa warga yang berhalangan hadir.

2. Partisipasi Tenaga

Partisipasi Tenaga warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya dalam pelaksanaan program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo dapat dikatakan sudah berpartisipasi karena warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya sudah berpartisipasi dalam melakukan penjagaan secara bergilir di Pos Satu Pintu, penyemprotan rutin disinfektan, serta melaksanakan kerja bakti yang dilaksanakan secara rutin satu bulan sekali.

3. Partisipasi Harta Benda

Partisipasi Harta Benda yang dilakukan masyarakat RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya dalam pelaksanaan program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo dapat dikatakan sudah berpartisipasi karena warga dengan suka rela menjadikan rumah mereka sebagai rumah isolasi dan lumbung pangan, serta iuran swadaya masyarakat yang dilakukan melalui RT ataupun sumbangan di masjid digunakan untuk mendukung segala kebutuhan program Kampung Tangguh, serta bantuan sembako dan kebutuhan lainnya terhadap warga yang terdampak.

4. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran

Partisipasi keterampilan dan kemahiran warga di RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya dalam pelaksanaan program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo dapat dikatakan sudah berpartisipasi. Warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya memanfaatkan kemahiran profesi seperti doctor, perawat dan aparat keamanan negara dalam mendukung program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo, serta membagikan ilmunya kepada warga yang lain.

5. Partisipasi Sosial

Partisipasi Sosial warga di RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya dalam pelaksanaan program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo dapat dikatakan sudah berpartisipasi. Keikutsertaan warga RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya sebagai pengurus dan anggota Satgas Kampung Tangguh dengan selalu mengadakan evaluasi secara berkala.

Berdasarkan kelima fokus kajian tersebut yang meliputi Partisipasi Buah Pikiran, Partisipasi Tenaga, Partisipasi Harta Benda, Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran, serta Partisipasi Sosial yang dilakukan oleh warga di RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya dalam pelaksanaan program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo dapat disimpulkan telah berpartisipasi dengan baik karena terpenuhinya kelima fokus penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2008, *Pengorganisasian Dan Pembangunan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung : Humaniora
- Arditama, E., & Lestari, P. (2020). Jogo Tonggo : Membangkitkan Kesadaran Dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Undiksha*, 8(2), 157–167. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung. CV Pustaka Setia
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung. CV PUSTAKA SETIA
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Prtisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Harbani Pasolong. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, cv.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Jaya, S. B. (2017). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI KEPENGHULUAN BANGKO PUSAKA KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR*. 4(1), 1–15.
- Milles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, a Methods Sourcebook*. Sage Publications. Terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Pasolong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, cv.
- Priyanto, J. A., & Suseno, S. H. (2020). *Partisipasi Masyarakat Desa Cihideung Ilir Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Sebelum dan Sesudah Wabah Covid-19 (Society Participation Of Cihideung Ilir Community In Village Development Planning Before And After During*. 2(5), 701–708.
- Putro, S. C., & Desynatria, W. (2016). Interaksi antara Faktor Inisiatif dengan Faktor Penerapan Model Konstruktivistik Pengaruhnya terhadap Hasil Belajar Teknologi pada Siswa SMK. *Tekno*, 26(September), 92–99. <http://journal.um.ac.id/index.php/tekn/article/viewFile/8274/3805>
- Rofiq, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Keberhasilan Pengembangan Program Posyandu Lansia di Puskesmas Jagir Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(2), 1–14. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpc953f280cefull.pdf>
- Rusmiyati Chatarina, Umar (2011). *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. Yogyakarta. Grafindo Persada.
- Sitaro, S. K., Gosal, R., & Singkoh, F. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Di Desa Kisihang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Slamet . Y. 2004. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta. Universitas sebelas maret press.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta. Candi Gebang
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suriyanto, (2007). *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Suryawan, H. (2004). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Gramedia Pustaka.
- Totok Mardikanto, dan Poerwoko soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Pubilk*, (Bandung: Alfabet, 2019)
- Umar, H. (2004). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Gramedia Pustaka.
- Wibowo, 2004. *Globalisasi dan Ketimpangan*. Yogyakarta: Cideras Pustaka Rakyat Cerdas
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H Ayat (1)
- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1990
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/2020

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/111/432.1.2/2020

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Pasal 36 Ayat 1-2

<https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/perumahan-sukolilo-park-regency-keputih-sabet-juara-satu-kampung-tangguh-semeru/>

<https://www.suararakyatjatim.com/2023/01/04/ppkm-dicabut-wali-kota-eri-ajak-warga-surabaya-percepat-laju-kontribusi-ekonomi/>

<https://infocovid19.jatimprov.go.id/>

<https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph>

<https://jdih.surabaya.go.id/>

https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan_keputih

PEMBERDAYAAN KELOMPOK PETERNAK LEBAH DI KAMPUNG MADU DUSUN PURWOREJO DESA BRINGIN KABUPATEN KEDIRI

Monica Widi Marlan^{1*}, Drs. Ananta Prathama, M.Si²
¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat e-mail; widimonica27@yahoo.co.id
*Corresponding author: prathama.ananta@gmail.com

Abstrak

Histori Artikel

Submitted
20 Juli 2023
Reviewed
21 Juli 2023
Accepted
21 Juli 2023
Published
29 September 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pemberdayaan kelompok peternak lebah madu dengan mengambil tempat penelitian di Kampung Madu Dusun Purworejo, Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini melalui tiga tahapan pemberdayaan dari Wrihatnolo dan Dwijowijoto, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Tahap penyadaran pada pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bringin terhadap peternak lebah cukup efektif pada pelaksanaannya karena dilakukan secara berkesinambungan; 2. Tahap pengkapasitasan Peningkatan keterampilan peternak lebah, variasi produk madu, serta kesadaran peternak lebah untuk mengembangkan produknya dengan

membuat label; 3. Tahap pendayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Bringin kepada para peternak sudah cukup baik dilaksanakan, dengan melakukan kegiatan promosi untuk lebih mengenalkan Dusun Purworejo sebagai Kampung Madu. Ketiga tahapan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Bringin tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan sudah cukup optimal.

Kata kunci: Lebah, Madu, Tahap Penyadaran, Tahap Pengkapasitasan, Tahap Pendayaan

Abstract

This research aims to determine the stages of empowering groups of honey beekeepers by taking research sites in Kampung Madu, Purworejo Bringin's Village, District of Badas, Kediri Regency. This is a descriptive qualitative study using the technique of data collection namely, observation, interview, and documentation. The focus of this research is based on three stages of empowerment by Wrihatnolo and Dwijowijoto they are: (1) Awareness Stage; (2) Capacity Building; (3) Empowerment Stage. The research found out that 1. The process of the awareness and assistance to beekeeper's has been carried out well, because it is carried out on ongoing basis; 2. An increase of the beekeeper skill's, a variation of honey product's, and also an awareness from beekeeper's to develeop their product with creating a label; 3. Promoting Purworejo village as Honey Village and also Bee educational tourism village. The three stages of empowerment that have been carried out by the Bringin's village government can be concluded that the empowerment process carried out is quite optimal.

Keywords: Bee, Honey, Awareness Stage, Capacity Building, Empowerment Stage

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya melakukan sebuah pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan merupakan suatu wujud usaha untuk kemajuan hidup. Pembangunan juga secara umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju kearah yang lebih baik (Anwas, 2014). Pembangunan tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Merujuk kembali pada konsep kenegaraan, tujuan akhir dari suatu pembangunan yaitu dengan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum pada sila kelima Pancasila.

Salah satu contoh pembangunan yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah ialah melalui pembangunan masyarakat. Masyarakat memegang andil paling besar terhadap keberhasilan dari sebuah pembangunan. Karena titik sentral dari sebuah pembangunan adalah manusia, atau pembangunan pada peningkatan kualitas kehidupan manusia. Model pembangunan seperti ini merujuk pada *people centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia). Fokus dari model ini adalah pada peningkatan kemampuan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Contoh dari model ini adalah dengan *empowering* atau pemberdayaan (Nurcholis, Kartono, & Aisyah, 2016)

Sejak era reformasi, implementasi dari sebuah pembangunan tersebut di realisasikan dengan melakukan pembangunan daerah. Perkembangan pembangunan daerah memang disesuaikan dengan kultur, budaya, potensi dari daerah masing-masing. Terlebih lagi dalam penyelesaian masalah yang timbul dengan penanganan yang sesuai dengan daerah itu sendiri. Pembangunan daerah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pemanfaatan potensi daerah dengan semaksimal mungkin. Dengan memaksimalkan potensi daerah tersebut, akan mempercepat pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, pemerintah pusat memperlihatkan keseriusannya dalam pembangunan daerah dengan memberikan kewenangan lebih pemerintah desa untuk membangun desanya sendiri (Agnes, 2018)

Desa saat ini, adalah tentang pemberdayaan. Desa adalah tentang kemandirian suatu komunitas. Desa adalah entitas tersendiri (Mahfud, 2019). Untuk memperkuat potensi masyarakat desa dengan upaya pemberdayaan masyarakat desa yaitu melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.48 Tahun 2018. Tujuan dari Keputusan Menteri tersebut adalah untuk mendorong pembangunan Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih kreatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa sehingga dalam hal ini, upaya ini dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian desa. Ketentuan tersebut memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat desa untuk lebih bebas berkreatifitas dalam memajukan desanya. Salah satu contoh pengembangan potensi dalam hal ini pengembangan produksi madu melalui pemberdayaan desa ada di Kampung Madu

Kampung Madu terletak di wilayah Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri memiliki potensi pengembangan madunya, karena berada di wilayah lereng Gunung Wilis. Gunung Wilis merupakan salah satu *spot* penyedia pakan lebah di Kabupaten Kediri. Berada di ketinggian 567,00 meter diatas permukaan laut dan berbatasan dengan hutan lindung dengan jenis tanaman pinus dan kaliandra yang merupakan salah satu pakan lebah. Pemanfaatan hutan di lereng Gunung Wilis sebagai tempat “angon” lebah tidak hanya di peruntukan bagi para peternak di wilayah Kabupaten Kediri, namun juga oleh para peternak di Jawa Timur. Pada tahun 2013 menurut data BPS Kabupaten Kediri jumlah produksi pengolahan madu mencapai 1,2 ton. Jumlah ini masih perlu di kembang lebih jauh lagi, mengingat untuk memenuhi *gap demand* dan *supply* produksi madu nasional

Dijelaskan lebih lanjut bahwa Indonesia memiliki potensi pengembangan produksi madu yang sangat besar. Pengembangan tersebut memanfaatkan sektor perhutani. Dilansir dari artikel berita Fakultas Peternakan IPB (2019) menyatakan bahwa luas daratan Indonesia sekitar 200 hektar dengan 40% dari lahan tersebut berpotensi sebagai penyedia pakan lebah (*bee forage*), dijelaskan lebih lanjut pula bahwa produksi madu nasional saat ini baru mencapai 4000 hingga 5000 ton pertahun sedangkan angka konsumsi madu nasional ada di kisaran 7000 hingga 15.000 ton pertahun. Dengan *gap demand* dan *supply* sekitar 3.500 hingga 11.000 ton, menjadi suatu potensi besar akan budidaya madu itu sendiri. Melihat potensi pengembangan madu yang besar dan menjanjikan, Kampung Madu berhasil menjadi salah satu sentra

produksi madu di terkenal di Kabupaten Kediri. Terdapat 40 peternak lebah yang memiliki kurang lebih 4.840 *stup* (kotak lebah) dan jenis lebah unggul yaitu *Apis Mellifera* yang mampu menghasilkan puluhan hingga ratusan ton madu setiap tahunnya (Nugroho, 2019)

Dusun Purworejo sangat jeli memanfaatkan potensi lingkungan dusunnya yang memiliki 40 peternak lebah. Melalui kerjasama antar peternak lebah madu dan warga sekitar berkelompok membentuk sebuah Kampung Madu. Hasil dari budidaya lebah ini tidak hanya madu, namun juga berupa *royal jelly*, *bee pollen*, dan juga propolis. Para peternak lebah di kampung madu ini membudidayakan lebah mereka dengan cara “Angon” peternak membawa lebah mereka ke daerah yang sedang banyak bunga bermekaran. Misalnya, jika peternak ingin madu memiliki rasa mangga, kaliandra, randu atau rambutan, peternak tinggal mencarikan daerah-daerah yang memiliki bunga sesuai dengan rasa tersebut. Pada awalnya pada tahun 1980-an di dusun Purworejo sendiri hanya ada satu peternak lebah . Dimulai dari satu peternak itu, dengan mempekerjakan warga sekitar

Kampung Madu saat ini telah menjadi kawasan sentra madu di Kabupaten Kediri. Kampung madu juga menjadi salah satu daerah penghasil madu terbesar di Kabupaten Kediri (Masyhari, 2018). Tidak hanya itu, pemerintah desa berkeinginan Kampung madu tidak hanya dikenal menjadi sentra madu saja namun juga berkembang menjadi desa wisata edukasi tentang perternakan lebah Kampung madu telah menjadi tempat masyarakat umum untuk mencari ataupun membeli berbagai macam produk madu tapi juga untuk sarana edukasi seputar budidaya lebah mulai dari siswa sekolah hingga para akademisi perguruan tinggi dan pejabat pemerintah. Prestasi yang diterima oleh kampung madu ialah menjadi nominator Anugerah Desa tahun 2019 dalam nominasi inovasi terbaik pemberdayaan UMKM.

Pada awalnya para peternak lebah lebih memilih untuk menjual hasil panennya secara borongan atau partai tanpa adanya pengolahan dan pengemasan. Padahal apabila para peternak menjual hasil madu yang sudah diolah dan dikemas dengan sedemikian rupa akan menaikkan nilai ekonomis dari produk madu tersebut. Hal ini lah yang sedang dilakukan oleh para peternak lebah dan tentunya dengan dorongan oleh pemerintah desa. Pada tahun 2018, para peternak mulai berani untuk mengolah, melabeli, dan menjual hasil madunya dengan membuka toko kecil secara mandiri ataupun menitipkan merk madunya ke joglo kampung madu yang telah disediakan oleh pemerintah desa. Hingga kini sudah ada 15 peternak madu yang memiliki merk dagang produk madu. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, tidak semua peternak lebah berkembang sukses dalam menjalankan produksi madu

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara teoritis menurut (Sugiyono, 2005) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran manusia secara individu maupun kelompok

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Penulis sendiri memilih tempat penelitian yang bertempat di Kabupaten Kediri. Sesuai dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Bagaimana Pemberdayaan Kelompok Peternak Lebah Madu di Kampung Madu, maka situs penelitian ini adalah pada Kampung Madu Dusun Purworejo, Desa Bringin, Kecamatan Badas.

Sugiyono (2005) mengatakan salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu bersifat tunggal dan parsial. Dengan demikian berdasarkan gejala tersebut peneliti kualitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian tentang bagaimana pemberdayaan kelompok peternak lebah madu di kampung madu menggunakan teori (Wrihatnolo & Dwijowijoto, 2007) yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.

1. Tahap Pendayaan

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian kesadaran bahwa mereka memiliki hal untuk bisa memiliki sesuatu yang dapat dipergunakan dalam mengembangkan dan menaikkan harkat yang mereka miliki. Dalam hal ini target yang dimaksudkan

yaitu para peternak lebah di dusun Purworejo. Bentuk – bentuk “pencerahan” yang dilakukan diantaranya : a) Sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah desa Bringin dan perangkat desa sebagai pihak pemberdaya kepada para peternak lebah di dusun Purworejo sebagai sasaran pemberdayaan, dan b) Pendampingan kepada para peternak lebah di dusun Purworejo sehingga para peternak memiliki kesadaran bahwa pengembangan potensi mereka dapat meningkatkan harkat mereka

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap ini disebut “*capacity building*” atau proses dalam memberikan kemampuan atau memampukan manusia dalam konteks individu maupun kelompok. Pengkapasitasan yang diberikan kepada para peternak lebah dalam bentuk : a) pemberian skill atau kemampuan dalam beternak lebah, serta b) Pengembangan usaha madu, dimulai dari pengolahan produksi olahan madu, pengemasan produk, hingga pemberian label atau merk dagang olahan madu

3. Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan yaitu tahap pemberi daya itu sendiri, dengan diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Tahap pendayaan ini bagaimana para peternak lebah di dusun Purworejo diberikan dukungan-dukungan berupa : a) bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa Bringin sebagai pemberdaya untuk ikut mempromosikan produk hasil olahan madu para peternak

Untuk mendapatkan suatu data, perlu menggunakan sebuah teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai dengan focus dan tujuan sebuah penelitian. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Sugiyono sebagaimana dikutip oleh (Ghony, M, & Almanshur, 2014) menuliskan dari segi cara, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, interview, kuisisioner, dokumen, dan gabungan.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan yang berkaitan dengan focus penelitian. Berdasarkan locus penelitian observasi dilakukan di Kampung Madu di Dusun Purworejo, Desa Bringin, Kecamatan Badas untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan kelompok peternak lebah madu di kampung madu

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data secara wawancara, khususnya wawancara mendalam (*depth interview*) untuk memahami lebih jauh mengenai persepsi, perasaan, pengalaman dari subjek penelitian. Proses wawancara atau Tanya jawab ini dilakukan dengan informan mengenai pemberdayaan kelompok peternak lebah madu di kampung madu

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi untuk mendapatkan data-data pendukung ataupun data sekunder yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data tentang pemberdayaan kelompok peternak lebah madu di kampung madu dalam bentuk laporan, gambar, atau foto.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Miles and Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2005:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang telah penting, dicari tema dan polanya. Karena data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, reduksi data dipergunakan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempeprmudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka data harus dapat disajikan. Melalui penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian

data berarti mendisplay/menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya belum jelas menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal/interaktif dan hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi hasil penelitian.

HASIL

1. Tahap Pendayaan

a. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bringin

Proses sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa Bringin, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang diadakan berlangsung berulang-ulang untuk memastikan bahwa para peternak lebah di Dusun Purworejo ini memahami tentang pentingnya peningkatan usaha madu mereka. Proses sosialisasi ini dilakukan melalui rapat formal antara pemerintah desa dengan para peternak. Walaupun pada rapat formal ini hanya di adakan sekali saja, namun proses sosialisasi juga dilaksanakan melalui pertemuan informal seperti saat ronda malam dan kegiatan *nongkrong* di warung- warung warga. Hal ini ditandai dengan para peternak yang awalnya memiliki sifat pesimistis dan individualis berubah menjadi memiliki kesadaran dalam meningkatkan usaha mereka yaitu dengan memiliki kesadaran untuk mengemas dan menjual sendiri madu mereka menggunakan label atau merk dagang sendiri.

b. Pendampingan bagi para peternak lebah

Pendampingan yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi olahan madu ini tetap berjalan dengan semestinya. Kegiatan pendampingan ini sebenarnya pada utamanya berupa konsultasi. Bentuk-bentuk konsultasi yang dilakukan biasanya berkaitan dengan pembuatan ijin usaha Industri Rumah Tangga (PIRT), modal usaha, pemecahan masalah angon lebah. Permasalahan tentang angon lebah memang sering kali terjadi. Oleh karena itu, proses konsultasi ini melibatkan banyak pihak yaitu dari pihak peternak, warga setempat yang keberatan, perwakilan pejabat setempat, hingga petugas penyuluhan pertanian lapangan (PPL). Selain pendampingan dalam proses produksi, pendampingan juga diberikan kepada peternak yang memutuskan untuk tidak meneruskan atau berhenti menjalankan usaha madunya. Usaha yang dilakukan dalam proses tersebut yaitu dengan melakukan mediasi untuk kembali menjalankan usaha madunya. Kegagalan yang terjadi kepada peternak ini biasanya dikarenakan kurang bisa mengatur keuangan hasil penjualan, gagal panen, hingga kekurangan modal. Namun tak jarang peternak yang awalnya gagal, tetap berusaha untuk merintis lagi dai awal.

2. Tahap Pengkapasitasan

a. Pemberian Skill Beternak

Meskipun para peternak mendapatkan keahlian beternak secara mandiri tanpa adanya pelatihan beternak resmi dari pihak pemerintah desa. Dengan bekerja kepada salah satu peternak lebah itulah para warga mendapatkan keahliannya dalam beternak lebah. Namun pihak Pemerintah Desa Bringin tidak langsung lepas tangan begitu saja, sebagai bentuk tanggung jawabnya pemerintah desa merencanakan untuk mengadakan pelatihan wirausaha olahan madu.

b. Pengembangan usaha madu

Fokus dari pemerintah desa Bringin dalam pengembangan usaha madu salah satu aspek tersebut adalah pengemasan produk olahan madu. pengemasan produk olahan madu, para peternak menggunakan dua konsep pengemasan. Yaitu dengan menggunakan konsep *recycle* atau daur ulang dan menggunakan bahan kemasan baru. Kemasan daur ulang ini menggunakan bahan rekondisi yaitu botol kaca bekas minuman. Kemasan rekondisi ini sering digunakan oleh para peternak karena bahan yang mudah didapat,

dan lebih murah. Namun seiring berjalannya waktu, para peternak juga mulai beralih dengan menggunakan kemasan baru dengan berbagai macam bentuk dan ukuran sehingga menguntungkan para konsumen dengan banyaknya pilihan ukuran dari madu. Selain dengan perubahan pengemasan produk, pengembangan usaha madu juga terjadi dengan pemberian label dan merk dagang. Pemberian merk ini sangat penting dalam pengembangan usaha, karena tidak hanya sebagai identifikasi sebuah produk namun juga sebagai nilai tambah dalam sarana promosi produk olahan madu

3. Tahap Pendayaan

a. Promosi Kampung Madu

Usaha promosi ini adalah langkah dari pemerintah desa untuk mengenalkan lebih lanjut tentang potensi dari Dusun Purworejo. Ini berawal dari kurang dikenalnya nama Dusun Purworejo. Meskipun dengan banyaknya peternak lebah di daerah tersebut, nama Dusun Purworejo tetap masih kurang terdengar. Dipilihnya nama Kampung Madu merujuk kepada banyaknya peternak lebah yang memproduksi madu dalam satu kampung, serta penyebutan yang lebih *simple* dan mudah diingat oleh masyarakat luas. Komitmen yang di ambil oleh Pemerintah Desa Bringin dalam mengenalkan potensi yang dimiliki oleh Dusun Purworejo sebagai Kampung Madu dimulai dengan dibangunnya sebuah monument atau tugu Kampung Madu. Tugu Kampung Madu di maksudkan sebagai sebuah monument selamat datang dengan memanfaatkan jalan utama yang melewati wilayah Dusun Purworejo. Tidak hanya itu keseriusan Pemerintah Desa Bringin dalam mempromosikan Kampung Madu tidak hanya dalam pembangunan monument saja, namun juga dengan mengadakan sebuah Paket Edukasi Lebah yang dapat diikuti oleh masyarakat luas. Sasaran dari paket wisata ini adalah masyarakat umum yang ingin berkunjung dan ke Kampung Madu dan ingin belajar mengenai proses terjadinya madu, jenis-jenis madu, jenis tanaman pakan lebah, macam-macam jenis lebah.

PEMBAHASAN

1. Tahap Penyadaran

Wrihatnolo dan Dwijowijoto, (2007:2) menjabarkan bahwa tahap penyadaran yaitu bagaimana target pemberdayaan diberikan “pencerahan” dalam bentuk pemberian kesadaran bahwa setiap orang memiliki “sesuatu” yang dapat digunakan untuk meningkatkan harkat dan martabat yang mereka miliki. Karena bahwasana manusia adalah hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat Mardikanto dan Soebianto (2015:113).

a. Proses sosialisasi telah dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Bringin dengan cara memotivasi para peternak lebah untuk lebih mengembangkan usaha madu mereka. Proses sosialisasi ini dilakukan dengan mengadakan rapat desa atau pun dengan pertemuan – pertemuan informal para peternak lebah. Namun, walaupun telah dilaksanakan sosialisasi dan pertemuan-pertemuan tersebut dinilai masih kurang efektif. Karena proses sosialisasi masih berjalan satu arah, yang dimaksudnya adalah kurangnya keaktifan masyarakat dalam hal ini para peternak dalam menyampaikan saran dan pendapatnya. Tidak hanya itu, kendala dari proses sosialisasi ini dikarenakan sifat pesimistis dan individualis dari para peternak lebah itu sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, para peternak mulai menyadari bahwa perlu adanya peningkatan dalam kegiatan wirausaha mereka. Mulai dari kesadaran untuk mengemas produk olahan madu dengan menggunakan merk atau label dagang sendiri. Oleh karena itu terdapat peningkatan pendapatan omset dari usaha madu mereka.

b. Pendampingan Peternak Lebah

Pada dasarnya proses pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu sebagai wadah sharing dan konsultasi. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memastikan kegiatan produksi olahan madu tetap berjalan dengan semestinya. Konsultasi yang dimaksud adalah mencari solusi dan masalah yang ditimbulkan dalam proses produksi madu. Bentuk konsultasi biasanya berkaitan dengan pembuatan ijin usaha Industri Rumah Tangga (PIRT), kemudahan pemberian pengajuan modal usaha, penyelesaian masalah angon lebah. Konsultasi juga diberikan kepada para peternak yang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam mengembangkan usaha madunya. Kegagalan yang sering terjadi kepada peternak biasanya dikarenakan kurang bisa mengtur keuangan hasil penjualan, gagal panen, hingga kekurangan modal.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan menurut Wrihatnolo dan Dwijowijoto, (2007:4) adalah sebuah proses dalam memberikan kemampuan atau memampukan manusia. Dalam hal ini sasaran pemberdayaan diberikan daya atau kuasa yang akhirnya sasaran tersebut menjadi cakap dalam mengelola daya tersebut. (Mulyawan, 2016)

a. Pemberian Skill Beternak

Dalam tahap pemberian *Skill* beternak lebah pada dasarnya tidak ada campur tangan pemerintah desa, karena pihak pemerintah desa tidak pernah mengadakan sebuah pelatihan lebah secara resmi. *Skill* beternak ini di dapatkan dengan cara belajar mandiri, yaitu dengan ikut bekerja dengan sebagai karyawan peternak lainnya. Dari yang awalnya hanya ada satu peternak di Dusun Purworejo hingga tumbuh menjadi 40 orang peternak lebah. Sebelum beternak lebah, pekerjaan masyarakat di Dusun Purworejo yaitu serabutan sebagai buruh tani, tukang becak, hingga pedagang.

b. Pengembangan Usaha Madu

Pada tahap pengembangan usaha madu pemerintah desa bringin memotivasi peternak untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan semakin berkembangnya kawasan Dusun Purworejo sebagai Kampung madu, pemerintah desa Bringin memfokuskan pengembangan usaha pada pengembangan produk olahan madu. Yaitu dengan pengembangan pengemasan produk madu, pemberian label dan merk dagang. Pengemasan produk olahan madu menggunakan dua konsep pengemasan, yaitu kemasan rekondisi atau recycle atau kemasan daur ulang, dan juga menggunakan kemasan baru dengan variasi bentuk dan ukuran. Pemberian label atau merk dagang juga getol dilakukan hingga kini telah ada lima belas merk usaha dari peternak lebah di Kampung Madu. Pemberian label ini tidak hanya sebagai identifikasi sebuah produk namun juga sebagai nilai tambah dalam sarana promosi produk olahan madu dari para peternak itu sendiri

3. Tahap Pendayaan

Tahap ketiga menurut Wrihatnolo dan Dwijowijoto, (2007:6) adalah tahap pendayaan yaitu pemberi daya itu sendiri diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang yang sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Maksudnya adalah pemberian daya atau kekuasaan sesuai dengan kecakapan penerima atau sasaran pemberdayaan. Dengan kata lain yaitu untuk lebih memperkuat potensi atau daya yang telah dimiliki oleh masyarakat, sesuai yang dikemukakan oleh Ginanjar Kartasmita dalam (Mulyawan, 2016)

Tahap pendayaan ini difokuskan pada pemerintah desa bringin dalam mempromosikan Dusun Purworejo untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. usaa promosi yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan membuat sebuah *tagline* yang mudah diingat oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh kurang dikenalnya nama Dusun Purworejo itu sendiri, dengan melihat potensi banyaknya peternak lebah yang dimiliki maka Pemerintah desa sepakat untuk mengenalkan Dusun Purworejo sebagai Kampung Madu. Hal kedua yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai sarana promosi dengan membangun sebuah monument atau tugu selamat datang di Kampung Madu di tepi jalan provinsi. Tugu Kampung madu hingga kini masih menjadi ikon dari Dusun Purworejo. Seiring dengan semakin dikenalnya Kampung Madu sebagai salah satu produsen Madu, pemerintah desa juga mulai mengarahkan Kampung Madu menjadi kawasan wisata Edukasi Lebah. Masyarakat luas dapat menikmati beberapa paket wisata edukasi Lebah yang ditawarkan oleh pihak pemerintah desa. Dalam Paket wisata edukasi ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya madu, jenis-jenis madu, jenis tanaman pakan lebah, dan macam-macam lebah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian tentang Pemberdayaan Kelompok Peternak Lebah di Kampung Madu Dusun Purworejo Desa Bringin Kabupaten Kediri, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan, yaitu:

1. Tahap penyadaran pada pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bringin terhadap peternak lebah cukup efektif pada pelaksanaannya. Walaupun pada awal proses sosialisasi dan pendampingan masih terdapat kendala yaitu berupa sifat individualis dan pesimistis dari para peternak, namun karena proses tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan secara terus menerus berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat dalam mengembangkan usaha madu mereka untuk meningkatkan harkat dan martabat serta ekonomi dari peternak itu sendiri.
2. Tahap pengkapasitasan pada pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bringin terhadap peternak lebah kurang signifikan pada aspek pemberian skill beternak. Karena pada dasarnya para

peternak mendapatkan skill tersebut secara mandiri dengan cara menjadi karyawan pada peternak lainya. Dari hal tersebutlah jumlah peternak di Dusun Purworejo terus berkembang hingga 40 peternak. Dalam aspek pengembangan usaha madu, pihak pemerintah desa berhasil dalam memotivasi peternak untuk berfokus pada pengembangan produk olahan madu. Dimulai dengan meningkatnya variasi kemasan pada produk madu dengan menggunakan dua konsep kemasan yaitu daur ulang atau kemasan rekondisi dan kemasan baru dengan variasi ukuran dan bentuk.

3. Tahap pendayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Bringin kepada para peternak sudah cukup baik dilaksanakan, dengan melakukan kegiatan promosi untuk lebih mengenalkan Dusun Purworejo. Yaitu dengan membuat *tagline* Kampung Madu agar lebih diingat oleh masyarakat luas, pembangunan monument atau tugu selamat datang di Kampung Madu, serta mempromosikan Kampung Madu dengan wisata edukasi Kampung Madu yang mana masyarakat luas dapat mempelajari bagaimana proses pembuatan madu, jenis-jenis lebah madu, jenis tanaman pakan lebah, hingga macam-macam jenis madu.
4. Berdasarkan ketiga proses tahapan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Bringin tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan sudah cukup optimal. Karena memang pada dasarnya proses pemberdayaan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus, agar keunikan dan potensi desa dapat diberdayakan dengan optimal. Dengan banyaknya peternak yang telah sukses dalam mengembangkan produk olahan madunya, masih ada pula peternak yang baru mulai merintis kembali usaha madunya dan masih perlu untuk di dampingi oleh pemerintah desa.

Daftar Pustaka

- Agnes, M. (2018). Analisis Implementasi Kewenangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tetinggal da Transmigrasi Terhadap Desa Temoan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Toraja Era Otonomi Daerah.
- Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaa Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ghony, M., M. D., & Almanshur, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mahtud. (2019, November 12). <https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/11/12/165570/sekali-lagi-tentang-desa>. Retrieved Februari 06, 2020, from <https://radarkediri.jawapos.com/https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/11/12/165570/sekali-lagi-tentang-desa>
- Masyhari, N. (2018, November 05). http://m.beritajatim.com/gaya_hidup/343519/budaya_angon_lebah_di_kampung_madu_kediri_sejak_1985.html. Retrieved Maret 02, 2020, from http://m.beritajatim.com/http://m.beritajatim.com/gaya_hidup/343519/budaya_angon_lebah_di_kampung_madu_kediri_sejak_1985.html
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Sumedang: UNPAD Press.
- Nugroho, A. (2019, Juli 26). <https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/07/26/148126/bringin-jadi-pusat>. Retrieved Maret 02, 2020, from <https://radarkediri.jawapos.com/https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/07/26/148126/bringin-jadi-pusat>
- Nurcholis, H., Kartono, D. T., & Aisyah, S. (2016). *Pembangunan Masyarakat Desa & Kota*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwijowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI SEBAGAI ALTERNATIF MENGURANGI PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA

Totok Minto Laksono, Victoria Fitriyanti, Hariani Devita
Universitas Hang Tuah Surabaya

totokminto.shmh@gmail.com, victoriafifi123@gmail.com, devisudarsono261@gmail.com

*Corresponding author: totokminto.shmh@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

4 September 2023

Reviewed

17 September 2023

Accepted

20 September 2023

Published

29 September 2023

Virus corona (Covid-19) yang melanda dunia saat ini sangat berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan hal utama yang berdampak pada dunia kesehatan. Covid-19 telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Penyebaran virus sangat cepat di hampir semua negara-negara di dunia telah membuat perubahan besar pada kehidupan manusia. Pemerintah negara bagian, khususnya Indonesia, telah membuat berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran virus yang masif ini. Kesehatan Komunikasi dilakukan oleh pemerintah melalui media sharing dalam menyampaikan pesan-pesan terkait Covid-19 kepada masyarakat. Salah satu media yang digunakan adalah aplikasi pelacak Covid-19 bernama PeduliLindungi. Teknologi komunikasi ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan mengurangi penyebaran virus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan manfaat komunikasi pembangunan melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai media

komunikasi kesehatan antar masyarakat Indonesia pemerintah dan masyarakat Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi kesehatan dan media kedua teori usia. Serta .Aktivasi aplikasi merupakan gerakan sosial dalam membangun kesadaran dan advokasi untuk penggunaan internet sebagai sumber berita sebagai kontrol informasi. Pandemi covid-19 memiliki dampak besar pada banyak aspek kehidupan konsumen, termasuk bagaimana mengakses layanan Kesehatan. Salah satu alternatif pendekatan yang telah muncul adalah Mobile Health sebagai mekanisme akses alternatif untuk layanan Kesehatan ditengah pandemi dan perawatan Kesehatan.

Kata Kunci ; Surabaya, PeduliLindungi, Covid

ABSTRACT

The corona virus (Covid-19) that is currently sweeping the world has had a huge impact on social and economic life, even the main thing that has an impact on the world of health. Covid-19 has been declared by WHO as a pandemic. The spread of the virus is very fast in almost all countries in the world, it has made big changes in human life. State governments, especially Indonesia, have made various policies to prevent the spread of this massive virus. Health Communication is carried out by the government through media sharing in conveying messages related to Covid-19 to the public. One of the media used is a Covid-19 tracking application called PeduliLindungi. This communication technology is expected to provide education and reduce the spread of the virus. This study aims to examine the role and benefits of development communication through the PeduliLindungi application as a media for health communication between the Indonesian government and the people of Surabaya. This study uses both health and media communication approaches to age theory. As well as. Activation of the application is a social movement in building awareness and advocating for the use of the internet as a source of news as information control. The COVID-19 pandemic has had a major impact on many aspects of consumers' lives, including how to access health services. One alternative approach that has emerged is Mobile Health as an alternative access mechanism for health services in the midst of a pandemic and health care.

Keywords: Surabaya, PeduliLindungi, covid

PENGANTAR

Pandemi Covid 19 yang melanda hampir di seluruh dunia, terutama di Indonesia memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Pencegahan terhadap virus ini terus dilakukan oleh pemerintah negara termasuk pemerintah Indonesia. Menurut data covid19.big.go.id di Indonesia sebanyak 184.268 orang yang positif terinfeksi Covid – 19.

Sembuh 132.055 orang dan yang meninggal sebanyak 7750 orang. Sedangkan berdasarkan data www.worldometers.info/coronavirus/ Indonesia berada di urutan negara ke 23 terbanyak yang positif terinfeksi virus Covid 19 (data diambil pada tanggal 3 September 2020).

Perkembangan teknologi dinilai memiliki dampak positif dalam menghambat penyebaran virus covid-19. Teknologi informasi memegang peranan dalam penyebaran informasi atau pesan positif sehingga mampu menekan jumlah korban Pandemi Covid 19 lebih banyak.(Hasyim et al., 2020) Media baru yang beroperasi dalam Jaringan (internet) telah dimanfaatkan dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Dimanfaatkan oleh individu, kelompok, maupun institusi dan lembaga negara. Berbicara tentang internet dan media baru khususnya, tidak dapat kita lepaskan dari wujud media baru itu sendiri layaknya sosial media.Salah satu fungsi sosial media “saat ini” adalah fungsi pelayanan publik, dimana sosial media dimanfaatkan sebagai media pelayanan publik oleh institusi maupun lembaga negara.(Yuliani et al., 2020)

Pemerintah di beberapa negara menggunakan media sosial untuk penyampaian informasi yang berkaitan dengan virus Covid 19 ke masyarakat. Negara China menggunakan program peta dan penelusur perjalanan untuk menghindari daerah yang terkena infeksi virus covid-19. Aplikasi yang bernama QuantUrban dan program WeChat, YiKuang atau "Epidemic Situation". Aplikasi ini melakukan pemetaan secara geografis, sehingga pengguna dapat mengukur seberapa dekat mereka dengan lokasi yang terinfeksi virus covid-19.

Begitupun negara India telah meluncurkan aplikasi smartphone bernama AarogyaSetu untuk membantu melacak orang positif terjangkit virus covid-19 dan orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan orang yang terjangkit virus covid-19. Microsoft Bingmeluncurkan peta interaktif baru melalui situs bing untuk memberikan update informasi tentang penyebaran virus covid-19 secara global.(Hasyim et al., 2020)

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua terbesar setelah Jakarta dengan jumlah penduduk 2,874 Juta jiwa pada tahun 2022. Dan Pemerintah Indonesia telah meluncurkan aplikasi pelacak Covid-19. PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh anak bangsa Indonesia. aplikasi ini diperkenalkan langsung oleh Kementrian Komunikasi dan Informastika. Aplikasi tersebut diciptakan sebagai salah satu upaya untuk meredam virus Covid19. Cara kerja aplikasi ini mengandalkan partisipasi dari masyarakat.

Aplikasi pelacak Covid-19 ini menjadi media komunikasi kesehatan oleh pemerintah Indonesia bagi masyarakat dalam mencegah penyebaran virus Covid19 yang hingga saat ini masih menjadi pandemi di beberapa negara termasuk Indonesia. pemanfaatan teknologi dalam pencegahan Covid-19 harus dilakukan secara bersamaan, yaitu dari penggunaan aplikasi itu sendiri diikuti dukungan dan edukasi dari kepala daerah kepada masyarakat.

Pada penelitian ini konsep komunikasi menggunakan komunikasi kesehatan dimana tujuan dari komunikasi kesehatan pertama untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan. Kedua ,komunikasi kesehatan bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari pengaruh kognitif, afektif dan psikomotorik. Penggunaan aplikasi terkoneksi dengan internet ini merupakan bentuk komunikasi kesehatan bermedia.

Menurut Liliweri (2008) Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan individu dan komunitas masyarakat, dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi baik komunikasi interpersonal, maupun komunikasi massa. Selain itu, komunikasi kesehatan juga dipahami. sebagai studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas agar dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan.(Rahmadiana, 2012).

Melalui media, promosi kesehatan bisa dilakukan secara lebih masif. Perkembangan media massa

terutama yang difasilitasi oleh teknologi internet menjadi tantangan baru dalam komunikasi kesehatan. Di satu sisi, keberadaan media baru (new media) ini membuka kesempatan untuk kegiatan promosi kesehatan yang lebih bersifat viral dimana keterlibatan pengguna internet bisa menjadi kunci sukses kegiatan promosi kesehatan.(Junaedi & Sukmono, 2018:13- 14).

Daya persuasi atau pengaruh suatu pesan sangat tergantung media apa yang dipilih komunikator untuk memindahkan pesan atau informasi kesehatan. Ada berapa media yang dapat digunakan, mulai dari media sensoris hingga media yang diciptakan manusia. Marshal Mc. Luchan, sosiolog asal Canada, untuk pertama kalinya mengemukakan bahwa sebenarnya teknologi media yang kita temukan sekarang tidak lain merupakan perluasan teori yang di gunakan pada penelitian ini adalah teori second media age. Kebenaran suatu teori menawarkan berbagai perspektif “kebenaran” dari suatu. realitas tetapi bukan satu-satunya cara untuk memandang suatu realitas atau fenomena. Konsepsi suatu teori menentukan bagaimana cara manusia memandang dunia dan menjadi suatu pendekatan terhadap melihat suatu fenomena dalam kehidupan manusia.(Rorong, 2019) .

Teori second media age berpandangan bahwa internet telah memberi ruang (cyberspace) jaringan yang memiliki kemampuan tak tertandingi dalam hal interaktivitas dibanding dengan media sebelumnya. Kemampuan ini pula yang menurut Holmes dianggap sebagai pencabut power yang dimiliki oleh media massa. Teori tentang cybersociety atau second media age terbilang baru dalam kajian komunikasi. Bukan hanya karena bangunan premis sosialnya yang baru namun teknologi internet memang baru massif di masyarakat sejak 1991. Holmes mengungkap bahwa Luhan, Innis dan Meyrowitz adalah tokoh-tokoh yang pemikirannya mampu mendasari kajian-kajian komunikasi terkait new media.(Sih & Sukmi, 2015).

Pada penelitian sebelumnya Nasution (2004) mengutip pernyataan Hedebro tentang tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang berkaitan dengan tingkat analisisnya. Ketiga aspek tersebut meliputi hal berikut: Pertama Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan peran media menyumbang upaya tersebut. Di sini, politik dan fungsifungsi media massa dalam pengertian yang umum merupakan objek studi, sekaligus masalah-masalah struktur organisasional dan pemilikan, serta kontrol terhadap media. Untuk studi jenis ini, digunakan istilah kebijakan komunikasi dan merupakan pendekatan yang paling luas dan bersifat umum; kedua Pendekatan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional, namun lebih jauh spesifik. Persoalan utama dalam studi ini adalah penggunaan media agar dapat dipakai secara efisien, untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat suatu bangsa; dan Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu Studi jenis ini. mendalami bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan penerimaan yang luas akan ide-ide dan produk baru.(Amanah, 2010)

Berdasarkan pemaparan diatas permasalahan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana peranan dan manfaat komunikasi pembangunan melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai media komunikasi kesehatan antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum. (Ruslan, 2010:215) Menurut Kriyantono (2006:69) jenis penelitian deskriptif adalah jenis riset yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat populasi atau objek penelitian. Periset sudah mempunyai konsep (biasanya satu konsep) dan mendalami bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan penerimaan yang luas akan ide-ide dan produk baru.(Amanah, 2010). Berdasarkan pemaparan diatas permasalahan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana peranan dan manfaat komunikasi pembangunan melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai media komunikasi kesehatan antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Surabaya serta Melakukan pengambilan data observasi untuk mengamati secara langsung Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai Alternatif mengurangi penyebaran Covid-19 di kota Surabaya.

A. Data dan Sumber

Teknik pengumpulan data dengan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan. Sumber data bisa responden atau subjek penelitian dari hasil pengisian kuesioner, wawancara, observasi (Kriyantono, 2006:41-42)

B. Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian ini berupa wawancara terhadap masyarakat Surabaya dengan pengguna aplikasi PeduliLindungi. Wawancara dilakukan dengan teknik purposive sampling peneliti menentukan kriteria mengenai informan mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel. Ketiga informan merupakan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda berusia 20-37 tahun.

C. Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti antara lain:

Peneliti melakukan observasi untuk menyajikan gambaran realistik atau kejadian nyata yang terjadi terhadap Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai Alternatif mengurangi penyebaran Covid-19 melalui analisis kualitatif deskriptif.

1. Wawancara → instrumennya: panduan wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang melakukan observasi terhadap pesan teks dan gambar serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Data sekunder dengan mengumpulkan data referensi dari literatur jurnal, buku dan website yang terkait dengan penelitian ini.

2. Observasi → lembar observasi atau catatan lapangan

Kapan pertama kali penyakit covid menyebar di Kota Surabaya.

Alternatif apa saja yang di upayakan agar mengurangi penyebaran covid

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data ini yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam mengungkap Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai Alternatif mengurangi penyebaran covid-19 dengan pendekatan analisa terhadap narasumber.

3. Prosedur Pengumpulan data

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:Online), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara pada penelitian ini dilaksanakan dengan tanya jawab kepada masyarakat yang telah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Tujuan wawancara ini dilakukan agar peneliti memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai Alternatif mengurangi penyebaran covid-19.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:Online), observasi merupakan teknik pengolahan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung apa yang dilakukan narasumber dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai Alternatif mengurangi penyebaran covid-19.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:Online), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catata harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen berbentuk karya misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara

dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan merekam layar hasil wawancara dengan informan/narasumber terkait di lapangan.

Dalam prosedur pengumpulan data penelitian ini menggunakan berbagai prosedur antara lain:

1. Mempersiapkan panduan wawancara sebelum melakukan wawancara.
2. Melakukan Wawancara Melakukan Observasi.
3. Menggabungkan Hasil Wawancara dan Hasil Observasi.

D. Teknik Analisis Data

1. Teknik Penganalisisan Data

Menurut Sugiyono (2016:Online), mengemukakan teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Data Reduction (Redaksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/ Verification.

A. Redaksi Data

Menurut Sugiyono (2016:Online), data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, lalu dicari tema dan polanya.

B. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data yang di sini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun serta memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat.

C. Mengambil kesimpulan dan verifikasi data

Pada tahap ini peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab-akibat, dan proporsisi. Kesimpulan yang didapat juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekuatannya, dan kecocokkannya, yaitu yang merupakan validitasnya.

HASIL

PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan. Selanjutnya, jika Anda tetap berada di zona merah tersebut selama 30 menit, PeduliLindungi juga akan memberikan pengingat.

PeduliLindungi menggunakan data yang diproduksi oleh gadget dengan bluetooth aktif untuk merekam informasi yang dibutuhkan. Ketika ada gadget lain dalam radius bluetooth yang juga terdaftar di PeduliLindungi, maka akan terjadi pertukaran id anonim yang akan direkam oleh gadget masing-masing. PeduliLindungi selanjutnya akan mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19 atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP). Hal ini akan sangat membantu ketika orang tersebut tidak dapat mengingat riwayat perjalanan dan dengan siapa saja dia melakukan kontak.

PeduliLindungi sangat memperhatikan kerahasiaan pribadi pengguna. Data disimpan aman dalam format terenkripsi dan tidak akan dibagikan kepada orang lain. Data hanya akan diakses bila dalam risiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan. Jika pernah berada di tempat yang

dekat dengan kasus COVID-19 positif, baik tahu ataupun tidak tahu orangnya, PeduliLindungi membantu petugas resmi pelacakan kontak untuk menghubungi lebih cepat. dengan begitu, lebih cepat juga menghentikan penularan COVID-19. Dengan kondisi bluetooth aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi ponsel pengguna PeduliLindungi lainnya, yang berada di radius bluetooth, dengan menggunakan scanning bluetooth untuk merekam lokasi dan waktu kontakannya. Ponsel-ponsel yang berdekatan kemudian akan saling merekam ID anonim masing-masing.

Data ID anonim tersebut akan disimpan dalam rentang waktu 14 hari. Sehingga, apabila ada seseorang yang dinyatakan sakit oleh petugas kesehatan (bukan oleh aplikasi) dan diinputkan ke sistem database, maka sistem akan memfilter ID-ID anonim lain yang terekam pernah melakukan kontak dalam waktu 14 hari terakhir.

Kemudian, petugas kesehatan dapat menghubungi pengguna ponsel lain yang ada dalam riwayat kontak tersebut untuk mengingatkan resiko kontak yang pernah terjadi. Informasi riwayat kontak ini yang akan dipakai untuk melakukan tracking saat salah satu dari pengguna dinyatakan positif Covid-19.

Hasil tracking ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran Covid-19 dapat dilakukan. Sehingga semakin banyak partisipan masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, akan semakin besar pula partisipasi PeduliLindungi membantu pemerintah dalam melakukan tracking.

Keberadaan media baru (new media) ini membuka kesempatan untuk kegiatan promosi kesehatan yang lebih bersifat viral dimana keterlibatan pengguna internet bisa menjadi kunci sukses kegiatan promosi kesehatan. Keterlibatan pengguna untuk mengaktifkan bluetooth membuat aplikasi ini dapat berjalan maksimal dan membantu dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Teori second media age berpandangan bahwa internet telah memberi ruang (cyberspace) jaringan yang memiliki kemampuan tak tertandingi dalam hal interaktivitas dibanding dengan media sebelumnya. Jika sebelumnya media komunikasi kesehatan melalui media massa hanya menggunakan media konvensional seperti televisi dan radio.

Saat ini dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi khususnya internet telah membuat informasi kesehatan secara massal dapat diterima masyarakat dengan tepat. Aplikasi yang terdapat pada jaringan internet dapat membuat perubahan melalui gerakan sosial.

PeduliLindungi merupakan upaya gerakan sosial dalam bentuk komunikasi kesehatan. Menurut Vegh, gerakan sosial yang dilakukan di Internet dikategorikan sebagai berikut.

- a.) Pertama, membangun kesadaran dan advokasi penggunaan Internet sebagai sumber berita sebagai kontrol informasi. Aplikasi PeduliLindungi membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi bertambahnya penyebaran Covid-19. Sumber informasi dan imbauan yang terdapat di aplikasi PeduliLindungi berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Situs Resmi Covid-19 Indonesia dengan Organisasi Kesehatan dunia. (WHO). Sehingga informasi yang diberikan valid dan menghindari dari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat.
- b.) Kedua, pengorganisasian dan mobilisasi yaitu Internet digunakan sebagai koordinasi tindakan atau aksi nyata. Aksi nyata pengguna disini adalah saat mendownload dan mengaktifkan bluetooth aplikasi tersebut turut melacak penyebaran virus Covid-19. Dan mematuhi informasi protokoler kesehatan menghadapi penyebaran virus. (Urip, 2015) Aplikasi PeduliLindungi saat ini sudah di download oleh 1.000.000+ pengguna. Semakin banyak pengguna aplikasi ini akan memudahkan dalam pelacakan zona-zona yang terkena dampak Covid -19.

Informasi yang disampaikan pada aplikasi ini menjadi bentuk komunikasi kesehatan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid 19. Aplikasi ini merupakan media komunikasi kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini KEMINFO, Kementerian BUMN dan didukung oleh operator Telkom. Aplikasi pelacak Covid19 ini menjadi media komunikasi kesehatan dalam bentuk media sensori yang bisa dilihat dalam bentuk teks dan gambar dan berupa mechanical media dalam bentuk aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet.

Tujuan dari komunikasi kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan. Terlihat dalam fitur- fitur yang disajikan dalam aplikasi tersebut. Tidak hanya mendeteksi keberadaan daerah dengan positif Covid tetapi juga menghadirkan fitur sosialisai dan protokoler kesehatan dalam menghadapi pandemi ini. Berdasarkan data yang didapatkan pada riset oleh F.Dea (2020) sebagian besar masyarakat telah menerapkan beberapa protokol kesehatan seperti; menggunakan masker, penerapan social

distancing atau physical distancing dan penerapan etika batuk dan bersin dengan baik. Namun penerapan protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan tangan belum dilakukan dengan benar. Sebanyak 52,3% dan 56,9% peserta tidak mencuci tangan sebelum makan dan tidak membawa hand sanitizer saat bepergian sebagai bentuk self protection.(Dea & Pinasti, 2020)

Pada gambar di atas dapat terlihat fitur untuk memberikan informasi kapan kita harus memeriksakan diri ke dokter. Saat dihubungi oleh petugas kesehatan, sebagai hasil analisa aplikasi PeduliLindungi, berarti kita memiliki riwayat kontak dengan penderita Covid-19 positif, PDP, atau ODP. Maka kita harus memeriksakan diri ke dokter. Fitur lainnya bagaimana cara mencegah penyebaran Covid 19 seperti menjaga kesehatan, etika batuk, hingga protokoler kesehatan untuk menjaga jarak dan menggunakan masker yang tepat.

Gambar selanjutnya Informasi lokasi dampak Covid dan RS/klinik rujukan terdekat Selanjutnya lokasi terdekat yang berdampak juga akan ditampilkan begitu pula info Rumah Sakit maupun klinik terdekat yang dapat didatangi. Lievrouw dan Livingstone (2006) berpandangan bahwa terdapat tiga komponen dalam media baru yakni alat yang digunakan untuk berkomunikasi, aktivitas, dan praktek komunikasi, dan tatanan sosial atau tatanan organisasi yang berkembang di new media.(Junep, 2016).

Pada aplikasi ini menggunakan mobile phone sebagai alat dalam komunikasi organisasi pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid19 yang mempengaruhi segala perubahan tatanan sosial di masyarakat. Tujuan komunikasi kesehatan yang kedua adalah untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari pengaruh kognitif, afektif dan psikomotorik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 3 pengguna aplikasi ini. Ketiga informan tersebut berusia 20-37 tahun dengan latar belakang berbeda :

1.) Informan A seorang ibu rumah tangga, 2.) Informan B seorang pegawai swasta dan 3.) Informan C adalah mahasiswa.

Secara kognitif aspek yang berkaitan dengan pengetahuan, bersifat mental menggunakan pemikiran dan penalaran. Berdasarkan hasil wawancara dari aspek kognitif ketiga informan mendapatkan pengetahuan informasi mengenai virus Covid-19, antara lain protokol kesehatan yang tepat, keberadaan klinik terdekat hingga yang utama adalah informasi mengenai status zona covid-19 daerah dimana mereka tinggal atau pun saat berpergian. Sedangkan aspek afektif adalah yang berkaitan dengan sikap, emosi dan nilai. Dan aspek psikomotor terhadap tindakan.

Informan A dan B merupakan perempuan memiliki emosi yang lebih waspada dan berhati-hati menghadapi Covid -19 ini. Saat mereka menyadari zona tempat tinggal atau tempat yang akan mereka kunjungi merupakan zona merah. Mereka akan lebih memilih mengurangi aktivitas di luar rumah.

Sedangkan informan C tetap seperti biasa melakukan kegiatan dengan tetap mengikuti protokoler kesehatan. Informasi kesehatan lainnya yang didapatkan oleh ketiga informan adalah periksa kesehatan mandiri dan link dengan aplikasi kesehatan untuk berkonsultasi tentang kesehatan tanpa harus mengunjungi dokter.

Interaksi dengan paramedis dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Berdasarkan pemaparan diatas, aspek komunikasi pembangunan pada penelitian ini. Peran media dalam hal ini aplikasi PeduliLindungi yaitu melakukan kontrol informasi terkait pemberitaan kesehatan menghadapi pandemi Covid19. Sumber informasi berasal dari Kementrian Kesehatan dan Kementrian Informatika. S

tudi ini menggambarkan kebijakan komunikasi dalam penggunaan media agar dapat dipakai secara efisien, untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat Indonesia dan Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan aktivitas komunikasi untuk mempromosikan informasi kesehatan terkait Covid19. Dan diharapkan dapat mencegah penyebaran virus Covid19.

DISKUSI

Aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi pelacak Covid-19 menjadi media komunikasi kesehatan pemerintah kepada masyarakat menghadapi pandemi Covid19. Komunikasi pembangunan dalam era digital menjadikan media ini sebagai media partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita Covid-19 dapat dilakukan. Informasi pada aplikasi ini memberikan kewaspadaan kepada masyarakat terhadap penyebaran virus Covid-19. Dalam bentuk aplikasi yang portable membuat Pemerintah menjadikan aplikasi kesehatan ini sebagai media

komunikasi kesehatan dalam bentuk media sensori dan mechanical media. Dengan mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi masyarakat Surabaya dan masyarakat Indonesia melakukan gerakan sosial dalam membangun kesadaran dan advokasi penggunaan Internet sebagai sumber berita sebagai kontrol informasi.

Selain itu Kesehatan dan lainnya. Berikut dampak positif perkembangan teknologi dalam dunia Kesehatan:

1.) Memudahkan akses layanan Kesehatan

Banyak layanan kesehatan juga hadir secara online. Sehingga mampu memberikan kemudahan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien dapat mengakses informasi, layanan konsultasi dengan dokter, hingga membeli obat secara online. Jadi hal tersebut dapat menghemat waktu pasien. Dengan kemudahan itu, diharapkan pasien lebih peduli terhadap kesehatan masing-masing.

2.) Mempersingkat waktu tunggu pasien

Dengan aplikasi itu, pasien tidak perlu menunggu berjam-jam hingga mendapatkan pemeriksaan dari dokter maupun tenaga medis lainnya. Pasien dapat membuat janji online dengan dokter. Bahkan, banyak aplikasi yang menyediakan fitur konsultasi dokter secara online atau tanpa tatap muka langsung. Sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien. Penanganan secara tepat dapat diperoleh pasien lebih cepat.

3.) Mencegah penularan penyakit

Selain untuk pasien dan tenaga medis, teknologi juga dapat mencegah penularan penyakit. Contohnya pandemi Covid-19 seperti saat ini. Dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, masyarakat dapat mengetahui status kesehatan masing-masing. Juga informasi tentang klasifikasi daerah terjangkit Covid-19. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk menghindari daerah mana saja dengan intensitas penyakit lebih tinggi. Penularan penyakit pun lebih mudah dicegah.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi yang besar untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh negara berkembang maupun negara yang sedang berkembang dengan menyediakan akses cepat, cost effective, dan perawatan kesehatan yang berkualitas. Salah satu pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan, adalah telemedika. Dengan teknologi telemedika dapat membantu penderita penyakit serta lembaga kesehatan untuk saling berbagi informasi dengan mudah dan cepat. Salah satu latar belakang pembuatan aplikasi ini didasari pada jumlah penderita yang banyak. Selama bertahun-tahun, serangan jantung menempati urutan pertama kematian di seluruh dunia (Cleveland Clinic 2010). Pada tahun 2008 penyakit yang berhubungan dengan jantung (cardiovascular disease atau CVD) mencatat urutan pertama penyebab kematian di dunia, yaitu mencapai 17 juta orang. Sedangkan di Indonesia, kematian akibat CVD mencapai 30% dari total populasi. (World Health Organization 2011)

Sedangkan Pandemi Covid 19 yang melanda hampir di seluruh dunia, terutama di Indonesia memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Pencegahan terhadap virus ini terus dilakukan oleh pemerintah negara termasuk pemerintah Indonesia. Menurut data covid19.big.go.id di Indonesia sebanyak 184.268 orang yang positif terinfeksi Covid – 19. Sembuh 132.055 orang dan yang meninggal sebanyak 7750 orang. Sedangkan berdasarkan data www.worldometers.info/coronavirus/ Indonesia berada di urutan negara ke 23 terbanyak yang positif terinfeksi virus Covid 19 (data diambil pada tanggal 3 September 2020).

Perkembangan Teknologi di Era Digital

Dalam satu dekade terakhir ini, dunia kesehatan mengalami perubahan atau disrupsi yang cukup besar. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini akan mempermudah pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan. Dulu, pasien yang harus mendekati diri dengan penyedia layanan kesehatan. Sekarang, penyedia layanan kesehatanlah yang mendekati diri ke pasien. Bayangkan, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter hanya melalui aplikasi online di ponsel pintar. Begitu juga dengan pemesanan obat, pemeriksaan laboratorium, dan perawatan di rumah. Dipadu dengan jasa transportasi daring, pasien tidak perlu ke mana-mana untuk mendapatkan obat, informasi, dan layanan kesehatan. Cukup duduk sembari

memainkan jemari di atas ponsel pintar.

Bahkan sekarang sudah ada sistem pembuatan perjanjian konsultasi dokter secara daring dimana pasien dapat membuat, melihat, atau mengubah jadwal konsultasi sesuai kebutuhannya hanya melalui aplikasi seluler atau via SMS.

Di Indonesia, teknologi di bidang kesehatan digital mulai berkembang di era 90-an dengan diperkenalkannya istilah telemedika (telemedicine). Yaitu, praktik pelayanan kesehatan dengan menggunakan perangkat komunikasi audio, visual, dan data untuk kepentingan konsultasi, diagnosis, perawatan, serta pengobatan. Memasuki era milenium, teknologi kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis dan peresepan elektronik. Situs informasi kesehatan juga semakin menjamur dan dilengkapi dengan fitur konsultasi daring dengan dokter secara *real-time* dan apotik daring.

Dalam hal ini perkembangan teknologi di bidang Kesehatan tentunya memiliki tantangan tersendiri yaitu :

Sejatinya, kemajuan dalam teknologi kesehatan memiliki tujuan utama, yaitu mempersingkat berbagai proses layanan kesehatan yang rumit dan memakan waktu. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak sesederhana itu. Meski tak sering, ada kasus-kasus di mana kemajuan teknologi ini berbenturan dengan masalah etika medis. Bisa jadi karena memang berbagai pemangku kebijakan terkait tidak siap dengan cepatnya perkembangan yang ada. Seperti di Indonesia, pemerintah sebetulnya mendukung layanan kesehatan digital. Namun, hal ini tidak dibarengi dengan kecepatan dalam mengeluarkan regulasi atau kebijakan terkait.

Selain keamanan, kepemilikan data, aspek privasi, berbagi data, serta perizinan, perlu dipikirkan juga bagaimana upaya perlindungan konsumen. Karena perkembangan teknologi kesehatan berbasis digital bersifat terbuka, para pemangku kebijakan sangat perlu bertindak cepat untuk mengantisipasi hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. (2010). Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Februari, 08(1).
- Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana. Prenada Media Group.
- Sugiyono.(2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Yuliani, F., Adriadi, R., & Safitra, L. (2020). Media Baru Dalam Pelayanan Publik. *Commed : Jurnal Komunikasi Dan Media*, 4(2), 149.
- Urip, M. (2015). Gerakan Sosial di Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Gerakan Sosial Melalui Hashtag “ShameOnYouSBY” di Twitter). Tesis. Program Magister Ilmu Komunikasi. Universitas Diponegoro.
- Hasyim, H., Rizki Pratama Suroso, R., & Profesional Makassar, S. (2020). Peranan Teknologi Informasi Dalam Upaya Pencegahan Virus COVID-19 di Lingkungan Universitas. *CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 4(2), 124–129
- Harahap, R. A., & Putra, F. E. (2019). Buku Ajar Komunikasi Kesehatan. Prenadamedia Group.
- Dea, F., & Pinasti, A. (2020). Wellness And Healthy Magazine Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan

PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA CHINA

Totok Minto Laksono¹, Florensia Devina²,
Universitas Hang Tuah Surabaya
totokminto.shmh@gmail.com, florenvina18@gmail.com
*Corresponding author: totokminto.shmh@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted
4 September 2023
Reviewed
17 September 2023
Accepted
20 September 2023
Published
29 September 2023

Di dalam studi Perbandingan Administrasi Negara terkandung aspek yang relevan, yakni aspek Administrasi Negara yang mengandung pengertian umum tentang bagaimana lembaga-lembaga negara tumbuh dan hidup didalam suatu negara menjalankan fungsinya. Administrasi negara bukan merupakan bidang studi yang memiliki pengertian serta sifat yang umum dan berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu bidang studi yang tidak diterapkan di dalam suatu negara dengan multidisipliner. Administrasi negara pada hakikatnya merupakan salah satu aspek dari administrasi yang menekankan pembahasan pada bidang kenegaraan. Berbagai pendapat mengemukakan tentang pengertian atau batasan administrasi yang merupakan induk dari administrasi negara, namun secara umum

dapat diidentifikasi pengertian atau batasan tersebut, mengandung unsur-unsur: unsur proses penyelenggaraan, unsur kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan unsur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Susunan pemerintahan dapat diartikan sebagai permintaan lengkap yang terdiri dari berbagai bagian pemerintah yang bekerja sama mengandalkan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan unsur-unsur pemerintahan. Terlepas dari kenyataan bahwa sistem pemerintahan masing-masing negara ada kalanya berbeda satu sama lain. Wawasan kita juga bisa dijadikan bahan perbandingan bagi negara kita karena kita akan memperoleh pemahaman tentang sistem pemerintahan negara lain. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem pemerintahan, kita dapat merancang sistem yang dianggap lebih unggul.

Kata kunci: pemerintah, perbandingan, administrasi negara

ABSTRACT

In the study of Comparative Public Administration, there is a relevant aspect, namely the aspect of Public Administration which contains a general understanding of how state institutions grow and live in a country carrying out their functions. State administration is not a field of study that has a general understanding and nature and stands alone, but is a field of study that is not applied in a country with multidisciplinary. State administration is essentially one aspect of administration that emphasizes discussion in the field of statehood. Various opinions have suggested the definition or limits of administration which is the parent of state administration, but in general it can be identified that the definition or limits contain elements: elements of the organizing process, elements of cooperation carried out by more than one person and elements of achieving predetermined goals. The structure of government can be interpreted as a complete request consisting of various parts of government that work together relying on and influencing in achieving the objectives and elements of government. Despite the fact that each country's system of government may differ from one another. Our insights can also be used as a comparison for our country because we will gain an understanding of other countries' government systems. Therefore, once we know the similarities and differences between the various systems of government, we can design a system that is considered superior.

Keywords: government, comparison, public administration

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi dalam wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang diakui oleh rakyatnya, dimana terbagi atas beberapa unsur yaitu adanya wilayah, adanya pemerintahan, adanya rakyat dan adanya pengakuan/kedaulatan. Sedangkan administrasi adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama dan untuk perbandingan adalah dua hal atau lebih yang di bandingkan dengan hal yang lainnya. Administrasi negara perbandingan merupakan perbandingan administrasi di dua negara atau lebih yang berbeda. Mengingat pula pendekatan terhadap administrasi negara itu berbeda-beda, maka akan melahirkan pandangan yang berbeda pula. Dari perbedaan tersebut maka lahirlah perbandingan. Pada dasarnya perbandingan dilakukan untuk mengetahui berbagai macam organisasi kenegaraan serta kegiatan setiap organisasi dalam mencapai tujuan negaranya. Dapatlah diberikan pengertian ataupun batasan bahwa administrasi negara mengandung suatu pengertian kolektif yang meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sebagai suatu organisasi yang meliputi organ/ lembaga berikut fungsi masing-masing yang tumbuh dan hidup dalam suatu negara, dan semuanya itu diarahkan kepada pencapaian tujuan negara yang bersangkutan.

Perbandingan Administrasi Negara adalah ilmu yang baru bila dibandingkan dengan Ilmu Perbandingan Politik yang merupakan ilmu yang ditemukan asalnya pada zaman Aristoteles. Pada masa awalnya, sebelum permulaan abad ke-20 studi Administrasi Negara perbandingan itu terjalin di dalam studi Pemerintahan. Kemudian setelah PD II dengan pernyataan Robert E. Dahl (1947) ilmu ini mulai mendapatkan perhatian dan awal kelahiran Ilmu Administrasi Negara Perbandingan. Konferensi Princeton (1952) membahas lebih lanjut masalah riset dan metode pengajaran yang sistematis dari Administrasi Negara Perbandingan tersebut. Setelah diselenggarakan konferensi tersebut tahun 1952, perhatian terhadap Perbandingan Administrasi Negara semakin meningkat terbukti semakin banyaknya karya tulis dalam bidang tersebut dipelopori William J. Siffin (1957), dan sejak 1957 itulah hingga kini Ilmu Perbandingan Administrasi Negara terus mengalami perkembangannya. Istilah Perbandingan dalam Ilmu Administrasi Negara Perbandingan, terkandung pengertian mengajarkan serta menarik segi persamaan dan/ perbedaan dari gejala/fenomena/sasaran. Sedangkan Administrasi dalam pengertian yang lazim khususnya tentang Administrasi Negara dan Ilmu Politik umumnya, dimaksudkan sebagai salah satu gejala kehidupan dalam masyarakat yaitu sekelompok manusia/warga negara beraktivitas untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam hubungan dengan kata perbandingan timbul berbagai penafsiran.

METODE

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Internet Searching atau studi pustaka. Internet Searching adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek penelitian.

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui jurnal penelitian, internet, buku dan e-book yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

HASIL

Dalam studi Perbandingan Administrasi Negara terkandung aspek yang relevan, yakni Administrasi Negara? Administrasi Negara dengan pengertian umum tentang bagaimana lembaga Negara tumbuh dan hidup dalam negara menjalankan fungsinya. Administrasi Negara bukan merupakan bidang studi yang memiliki pengertian serta sifat umum dan berdiri sendiri, tetapi merupakan bidang studi yg tidak diterapkan dalam negara dengan multidisipliner atau Administrasi Negara pada hakekatnya merupakan salah satu aspek dari Administrasi yang menekankan pembahasannya pada bidang kenegaraan atau publik. Unsur-unsur Administrasi yang merupakan induk Administrasi Negara merupakan proses penyelenggaraan Kerja sama yang

dilakukan oleh lebih dari satu orang Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pengertian Administrasi Negara mengandung pengertian kolektif meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sebagai orang yang terdiri dari lembaga-lembaga beserta fungsi masing-masing yang tumbuh dan hidup dalam negara dan semuanya diarahkan mencapai tujuan negara. Setiap negara tidak menggunakan cara yang sama, juga yang menjadi tuntutan/cita-cita dari warga negara, hal ini didasarkan kepada kebutuhan masing-masing negara sebagai konsekuensi logis adanya perbedaan kebutuhan tersebut. Dengan demikian terdapat perbedaan pula dalam pengaturan Administrasi Negara di masing-masing Negara. Baik dalam mempersiapkan alat pelengkap sebagai sarana pencapaian tujuan.

Selama berabad-abad untuk memahami dan menjelaskan perbedaan prosedur serta bekerjanya berbagaimacam sistem politik, para teoritis telah membandingkan. Ahliilmu politik berusaha menemukan kondisi-kondisi yang ada dalam masing-masing negarayang menjadi objek risetnya untuk menjelaskan faktor yg menyebabkan perbedaan. Dalam membandingkan lembaga dan proses itu biasanya dilalui tahap tertentu.

Suatu sistem adalah seperangkat komponen, elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh-mempengaruhi dan saling tergantung hingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Sebagai suatu sistem, administrasi merupakan sistem yang bersifat:

1. Abstrak, karena tidak dapat dikenali wujud rupanya.
2. Buatan manusia (*man made systems*).
3. Terbuka (*open systems*), karena peka terhadap pengaruh lingkungan, baik sosial maupun fisik.
4. Hidup (*living systems*), berkembang terus akibat sifat terbukanya.
5. Kompleks, karena di dalamnya terdapat banyak subsistem.

Administrasi negara pada hakikatnya merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, maka sesuai dengan sistem pemerintahan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan administrasi negara yaitu keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara demi terciptanya tujuan Nasional.

Penyempurnaan administrasi negara Indonesia secara sungguh-sungguh telah dimulai sejak tahun 1966 dengan dibentuknya Tim Pembantu Presiden untuk Penyempurnaan Aparatur dan Administrasi Pemerintah (Tim PAAP) dengan Keppres No. 266 Tahun 1966 yang antara lain telah menghasilkan penataan kembali kedudukan dan hubungan antar lembaga-lembaga negara, penertiban susunan organisasi dan pembagian tugas-tugas pada Departemen dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/Kep/8/1966 dan No. 75/U/Kep/11/1966. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan administrasi negara Republik Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara, keuangan dan lembaga-lembaga negara untuk mewujudkan tujuan Republik Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia ialah Jakarta.

Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amendemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi dan komposisi keanggotaannya juga berubah. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Joko Widodo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa

portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya). Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amendemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.

Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap PKT tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan. Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang, namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa pun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan. Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apa pun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.

DISKUSI

Mengenai pembahasan tentang sistem administrasi negara Indonesia dengan China, maka ada beberapa perbedaan atau perbandingan yang bisa kita peroleh, yaitu:

1. Kesejahteraan rakyat
 - a) Republic Rakyat China (RRC)

Pemerintah RRC berpendapat bahwa hak asasi manusia sepatutnya mencakup kepuasan hidup dan kemajuan ekonomi. Dengan kata-kata berlainan, saat mengkaji dirinya, termasuk melihat kemajuan ekonomi dan kepuasan hidup rakyatnya sebagai meningkatkan situasi hak asasi manusianya, dan saat melihat situasi di Negara-negara maju seringkali menotakan terdapat tingkat kriminalitas dan kemiskinan yang tinggi di tempat-tempat yang dikatakan mempunyai penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tinggi. Praktek melihat HAM seperti ini, diamalkan di kebanyakan negara timur yang lain. Negara China memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyatnya karena upaya tersebut di mulai dari tingkat masyarakat yaitu petani dan pengrajin. Di negara China bambu di sihir menjadi sebuah pernak – pernik kerajinan yang unik dan mempunyai daya pikat, serta dapat di jadikan sebagai pengobatan infeksi, dan menurut pengobatan tradisional China bambu mengandung sumber pottasium yang rendah kalori, rasa manis nya terkenal sebagai sumber protein dan nutrisi yang baik.

- b) Indonesia

Setelah memberi catatan pada penduduk Indonesia yang masuk katategori miskin dan menengah, tiba waktunya memberi catatan atas penduduk Indonesia yang tergolong menengah-atas (3,6%, dibulatkan ke atas menjadi: 4%) dan atas (1%). Data yang berasal dari BPS dan Litbang Kompas tidak satu pun menjelaskan berapa batasan penghasilan (atau pengeluaran) bulanan kelompok ini). Bila kelas menengah berpenghasilan Rp 1,9 sebulan, maka secara statistik kita bisa menggolongkan bahwa kelas menengah-atas berpenghasilan di atas Rp 1,9 juta per bulan. Karena tidak ada rincian data pendapatan kelas itu, saya tetapkan menurut

pertimbangan sendiri bahwa kelas menengah-atas adalah penduduk Indonesia yang rentang penghasilan sebulannya berkisar Rp 1,9 juta hingga Rp 12 juta. Sedangkan kelas atas adalah mereka yang pendapatannya di atas Rp 12 juta. Acuan pertimbangan saya adalah pendapatan yang mungkin diterima oleh lulusan S1 (sederajat) yang masuk golongan III-A PNS pada tahun awal bekerja. Gayus, misalnya, tamatan S1 yang baru 1 tahun bekerja di kantor pajak, gaji resminya (setelah renumerasi di lingkungan Kemkeu) adalah Rp 12 juta per bulan. Golongan III-A adalah golongan yang memungkinkan seseorang menduduki level pimpinan, berpendapatan besar, dan menjadi kelas atas di kemudian hari. Kalau diperhatikan lebih mendalam lagi, sebetulnya orang yang pendapatannya di atas Rp 12 juta. belum juga bisa disebut kaya sekali. Maka, jika ingin lebih mendekati kenyataan, kelas atas pun harus dibagi lagi dalam beberapa segmen.

Namun, karena jumlah penduduk Indonesia adalah 240 juta jiwa, maka 5% berarti setara dengan 12 juta jiwa. Jumlah yang lebih dari cukup untuk menggerakkan roda ekonomi nasional, sekaligus menjadi kelompok penikmat utama hasil-hasil pembangunan, istimewa bagi yang masuk kelas atas yang cuma 1%. Maka, tidak perlu heran bila Indonesia yang 95% penduduknya masuk kelompok miskin-menengah, mampu menyajikan pemandangan harian seperti ini: Apartemen senilai Rp 5-10 miliar laris manis setiap kali launching, mobil mewah impor berseliweran di tengah kemacetan ibu kota, area parkir mal terkenal dipastikan penuh sesak oleh mobil-mobil berkelas dan terbaru. Indonesia menjadi salah satu penghasil bahan baku rotan dan bambu terbesar di dunia setelah negara China. Ini terbukti dari banyaknya permintaan bambu dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Australia dll. Produk bambu di Indonesia sangat di minati pasar di Amerika Serikat, Jerman, Australia, Jepang dan Prancis karena kualitasnya yang bagus. Sebenarnya kerajinan-kerajinan buatan orang Indonesia tidak kalah bagusnya dengan produk kerajinan negara China. Karena kurangnya minat untuk memanfaatkan bambu maka produksinya pun sedikit. Seharusnya pemerintah lebih gencar menjadikan bambu kepada masyarakat sebagai usaha ekonomi kreatif yang mampu mengatasi angka pengangguran setiap tahunnya. Karena bambu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia terutama masyarakat di pedesaan.

Perlu diketahui bahwa di Indonesia itu sendiri bambu-bambu dimanfaatkan untuk berbagai macam kerajinan tangan dan makanan yang mempunyai nilai jual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Antara lain yaitu sebagai kuliner, tunas pohon bambu merupakan sayuran yang populer dan bernilai ekonomis. Selain itu orang Indonesia memanfaatkan bambu untuk peralatan rumah tangga yang sebelum datangnya peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik. Diantaranya yaitu tempat nasi (boboko), tampah, tempat sampah, kipas, besek, topi bambu (caping), wayang bambu dan lain-lain. Selain itu juga bambu dibuat mereka menjadi sebuah alat musik tradisional seperti seruling dan angklung yang berasal asli dari daerah Sunda. Dari pemanfaatan bambu itu lah masyarakat bisa memperoleh keuntungan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tangan para pengrajin lah bambu-bambu di anyam dan di sulap menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai jual tinggi, dan produk dari bahan baku bambu di Indonesia kini sampai menembus pasar internasional.

2. Politik

a) Politik Negara Indonesia

Republik Indonesia (RI), biasa disebut Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang

berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 207 juta jiwa. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia ialah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amendemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amendemen UUD 1945, yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan dan TNI/Polri. MPR saat ini diketuai oleh Zulkifli Hasan. DPR saat ini diketuai oleh Ade Komarudin, sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Mohammad Saleh. Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Joko Widodo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya). Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amendemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.

b) Politik Negara China

Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Negara Tiongkok merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Konfusianisme. Setelah era monarki berakhir pada tahun 1911, Tiongkok diperintah secara otokratis oleh Partai Nasionalis Kuomintang dan beberapa panglima perang. Kemudian setelah 1949 pemerintahan dilanjutkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu. Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan pemimpin negara dipilih langsung oleh Partai melalui Kongres.

Walaupun terdapat sedikit banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilihan umum yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan, partai ini terus memiliki mengawasi, terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, pada masa yang sama pemerintah juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjukkan perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil. Penyaringan terhadap dakwah-dakwah politik juga rutin, dan RRT secara tegas menghapuskan protes atau organisasi apa pun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Demonstrasi Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan.

RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap PKT tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan. Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang, namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa pun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan. Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apa pun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pegawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.

3. Kualitas Pelayanan Publik

Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Undang-Undang ini berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan. Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum, yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara yang harus mempunyai wewenang. Seiring dengan perkembangan, fungsi pemerintahan ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (public service). Perubahan paradigma pemerintahan dari penguasa menjadi pelayanan, pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa.

Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta. Sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakyat. Di samping itu, ada kecenderungan adanya

ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki “uang“, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Birokrasi pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering atau selalu dikeluhkan karena tidak efisien dan efektif, birokrasi sering kali dianggap tidak mampu melakukan hal-hal yang sesuai dan tepat, serta sering birokrasi dalam pelayanan publik itu sangat merugikan masyarakat sebagai konsumennya. Hal ini sangat memerlukan perhatian yang besar, seharusnya birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu memudahkan masyarakat menerima setiap pelayanan yang diperlukannya, seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat itu mempermudahkannya, bukan mempersulit. Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik, pemerintahan yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula, sebaliknya pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak dapat terselenggara dengan baik. Dalam hal ini juga pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam kehidupan masyarakat dengan konsep negara kesejahteraan (welfarestaat) melalui instrumen hukum yang mendukungnya, hal ini boleh dilakukan agar dapat terlaksananya pelayanan publik dengan baik serta terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai konsumen dalam pelayanan publik welfarestaat ini sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara dalam pelayanan publik. Sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan semua institusi governance memiliki suara dalam pembuatan keputusan, hal ini merupakan landasan legitimasi dalam sistem demokrasi, good governance memiliki kerangka pemikiran yang sejalan dengan demokrasi dimana pemerintahan dijalankan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah yang demokratis tentu akan mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga dalam pemerintahan yang demokratis tersebut penyediaan kebutuhan dan pelayanan publik merupakan hal yang paling diutamakan dan merupakan ciri utama dari good governance.

4. Daya Saing Global

Dibanding negara-negara yang sekarang disebut 'macam baru perekonomian' seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan dan India, daya saing teknologi Indonesia relatif ketinggalan termasuk jika disandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Padahal menurut direktur Riset di Indonesia Strategic Institute Ridwansyah Yusuf Achmad, Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah. Perbedaan aspek perekonomian Indonesia dan China yaitu sebagai berikut :

a) Biaya bahan mentah dan biaya produksi

Indonesia = Walaupun kaya akan SDA, namun untuk produksi tertentu ada bahan baku yang harus impor dari luar negeri, padahal potensi input dalam negeri bisa dioptimalkan.

China = Biaya bahan mentah rendah, hal ini membuat biaya produksi murah dan produksi efisien (economies of scale).

b) Pola konsumsi

Indonesia = Cenderung konsumtif dan lebih suka beli barang impor dari pada yang diproduksi oleh negara sendiri, tidak peduli harganya mahal atau tidak karena gengsi.

China = Masyarakatnya mengkonsumsi barang yang dihasilkan sendiri. Mereka tidak ingin membeli yg impor karena mahal.

c) Distribusi pendapatan

Indonesia = Masih banyak terdapat kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin, tingkat pendapatan antar daerah juga timpang.

China = Distribusi pendapatan yang merata, dikarenakan perencanaan ekonomi yang terpusat.

d) Arus perdagangan ekspor impor

Indonesia = Ekspor Indonesia cukup signifikan untuk beberapa komoditas, namun impornya juga besar, sehingga net surplusnya kecil bahkan sampai ada yang defisit.

China = Produksi massal dengan biaya murah membuat China sebagai eksportir terbesar dunia saat ini.

e) Nilai tukar dan Daya beli

Indonesia = Nilai tukar rupiah cukup stabil dengan peningkatan daya beli dan konsumsi kelas menengah, akan tetapi daya beli tidak merata di setiap daerah

China = Nilai tukar yang baik diimbangi dengan daya beli, namun ekonomi China lebih ditunjang oleh ekspor, bukan konsumsi

f) Tenaga kerja

Indonesia = Penduduk Indonesia juga banyak, akan tetapi keunggulan komparatif dalam upah murah telah kalah bersaing.

China = Jumlah penduduk yang sangat banyak menjadikan China memiliki upah buruh yang murah.

5. Kinerja Birokrasi

a) Republik Rakyat China (RRC)

Reformasi dalam birokrasi merupakan keharusan karena jika birokrasinya sudah tepat maka birokrasi bisa menjungkirkan penguasa. Birokrasi bisa mempunyai kekuasaannya sendiri. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah wewenang dari peraturan perundang-undangan. Dalam birokrasi terdapat dua pilar yaitu Budaya dan Aturan. Salah satu contoh reformasi birokrasi adalah reformasi birokrasi di negara China. Kegagalan total yang melanda China pada tahun 1959, 1960, dan 1961 yang tengah melakukan revolusi kebudayaan membuat pemerintah China mereformasi sistem birokrasinya. Perubahan terjadi pada tahun 1978 setelah terjadinya konsolidasi politik di bawah Deng Xiaoping. Di bawah pemerintahannya, para pemimpin tidak boleh terlalu berketat pada ideologi komunis, tetapi juga pada pengembangan ekonomi. Dengan terjadinya konsolidasi politik, pemerintah China bisa kembali memainkan peranannya soal perekonomian. Programnya dimulai dari reformasi sektor pertanian, dimana petani boleh memilih dan memproduksi komoditas yang akan ditanam, dan reformasi selanjutnya di sektor industri dan jasa. Selain itu juga pemerintah China membuat beberapa kebijakan-kebijakan dalam reformasi birokrasinya.

Pada tahun 1979 China memutuskan meliberalisasikan sektor keuangan dengan memanfaatkan kehadiran bank. Dana pembangunan yang sebelumnya mengandalkan alokasi anggaran pemerintah, mulai diserahkan ke lembaga perbankan, yang juga merupakan bagian dari pengenalan kepada mekanisme pasar yang relatif lebih efektif soal alokasi kredit. Selain itu pemerintah melakukan desentralisasi wewenang terhadap pemerintah lokal untuk mengembangkan perekonomian setempat, diluncurkannya hukum dengan mengizinkan swasta memiliki perusahaan, dan diluncurkannya kebijakan persaingan, untuk menarik investasi asing langsung sehingga menurunkan tarif impor, menghapus monopoli BUMN dalam ekspor dan mengakhiri sistem kurs mata uang ganda.

Pada tahun 2001 arah perekonomian dengan menggunakan model mekanisme pasar dilanjutkan dengan menjadi anggota WTO. Pada tahun 2004 ditekankan peran non-BUMN sebagai basis utama perekonomian dengan adanya peraturan baru untuk melindungi pengambilalihan aset swasta. Pada tahun 2005 sektor swasta bebas bisnis diinfrastruktur, jasa umum dan keuangan, yang sebelumnya dilarang. Selain

reformasi di atas terdapat juga reformasi nonekonomi yaitu, pendidikan dimana semua warga mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun dan jumlah murid yang memasuki pendidikan tinggi naik 3,5 kali pada 2003 dengan penekanan lebih kuat pada pendidikan teknik. Upah pekerja membaik karena kegiatan ekonomi makin besar. Kemudian, diluncurkan pula kebijakan tentang pengurangan pajak dan pemberantasan pungutan liar di pedesaan untuk menaikkan pendapatan.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa China berhasil reformasi birokrasi. Berhasilnya reformasi birokrasi di China, dengan perubahan di sektor budaya dan aturan, dapat dijadikan contoh bagi Indonesia untuk mengatasi masalah reformasi birokrasi yang selama ini belum terselesaikan dengan tuntas.

b) Indonesia

Dalam perkembangannya pengorganisasian birokrasi mulai diwarnai dengan ketidakpastian akibat peranan partai-partai politik yang saling bersaing dengan sangat dominan, partai-partai politik mulai melakukan building block kekuasaan melalui pos-pos kementerian strategis di jajaran pemerintahan sebagai sumber daya kelangsungan partai politik yang bersangkutan, program rekrutmen birokrasi ikut mengalami spoil system yang merajalela mulai dari pengangkatan, penempatan, promosi dan instrumen kepegawaian lainnya tidak didasarkan kriteria penilaian melainkan berdasarkan pertimbangan politik, golongan serta unsur-unsur lainnya diluar tugas birokrasi.

Ketika Suharto pertama kali membentuk Kabinet Pembangunan I dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968, dibentuk kementerian nomenklatur baru yaitu Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negarabertugas antara lain melanjutkan pembersihan birokrasi dari unsur-unsur apa yang disebut dengan berpolitik kepartaian lalu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 pada tanggal 29 Nopember 1971 didirikan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai organisasi wadah tunggal bagi seluruh pegawai pemerintahan Indonesia dan dalam perkembangan selanjutnya Tim PAAP dan Proyek 13 akhirnya dilebur kedalam Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara sedangkan Sektor Aparatur Pemerintah (Sektor P) tetap dan berfungsi meliputi penyusunan kebijaksanaan, perencanaan, pembuatan program, koordinasi, pengendalian, dan penelitian dalam rangka menyempurnakan dan membersihkan aparatur negara dan Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara yang dipimpin oleh seorangan menteri merangkap menjadi anggota Sektor N (Penelitian dan Pengembangan) dan Sektor Q (Keamanan dan Ketertiban) dan dengan Keppres Nomor 45/M Tahun 1983 Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara diubah kembali menjadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negarayang secara langsung menteri pada kementerian tersebut merangkap pula sebagai wakil Ketua Bappenas. Tahun 1995 melalui Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995 pemerintah mencanangkan dimulai diterapkan lima hari kerja yaitu hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1995 sebagai akibat dari sistem pembinaan Karier PNS, pertumbuhan nol pegawai negeri sipil (PNS) (Zero Growth) seta perampingan organisasi. Setelah tahun 1998 yang dikenal sebagai gerakan reformasimaka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 mengenai keberadaan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai anggota partai politik lalu diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 yang membuat pegawai negeri sipil (PNS) kembali tertutup dari kemungkinan untuk ikut berkiprah sebagai keanggotaan dalam partai politik apapun.

KESIMPULAN

Ada kekurangan dan kelebihan dari setiap Negara, akan tetapi untuk Negara Indonesia tersendiri harus lebih belajar dan berusaha untuk menjadi Negara maju. Faktor pendidikan terutama modal bangsa Indonesia yang masih kurang. Negara China yang bisa disebut birokrasi reformasi yang bagus, patut di contoh untuk penerapan di Indonesia. Indonesia, masih banyak terdapat kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin, tingkat pendapatan antar daerah juga timpang. China. Distribusi pendapatan yang merata, dikarenakan perencanaan ekonomi yang terpusat. China telah memberikan pelajaran yang sangat berharga mengenai bagaimana seharusnya Negara mampu bertindak dan berperan dalam ekonomi politik global sekarang ini.

Bangsa China selalu khawatir bahkan takut akan serbuan-serbuan produk China yang murah, tetapi kualitas cukup baik. Disini Negara mampu menaikkan perusahaan yang efektif dalam menjaga integrasi pasar untuk selalu dalam skala relatif yang disesuaikan dengan kondisi dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada totalitas pasar. Di Indonesia mestinya bisa mengambil pelajaran seperti itu, para elit negara tersebut mempunyai pola pikir yang layak di jadikan pelajaran, legiminasi pemerintah harus dibangun melalui usaha bagaimana meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Pandangan tersebut penting diperhatikan karena kebijakannya politik pemerintah di Indonesia lebih berpihak pada kooporasi-kooporasi besar, kebijakan – kebijakan yang di ambil cenderung pragmatis demi melakukan pelanggaran kekuasaan lima tahun kedepan. Hal yang telah bisa kita ambil pula adalah bagaimana mampu memupuk nasionalisme dalam keseluruhan proses kebijakan publik ketika negara tersebut mengintegrasikan diri dalam perekonomian global.

DAFTAR PUSTAKA

- Imania, Ayu. 2023. *Perbandingan Administrasi Negara*. Tersedia: https://www.academia.edu/9703519/Perbandingan_adm_negara. [Mei 2023].
- Wati, Risma, dkk. 2023. *Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China dan Rusia*. Tersedia: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mo d/resour ce/view.php%3Fid%3D101629&ved=2ahUKEwiz45-gnIz_AhUt3jgGHdKGAXkQFnoECA8QBg&usg=AOvVaw3ts9eL-E60MFtf55oSE5Qj. [Mei 2023].
- Aryono, Eko, dkk. 2016. *Perbandingan Negara Indonesia Dengan China*. Tersedia: <https://id.scribd.com/document/334857903/Tugas-Perbandingan-Pemerintahan-Indonesia-vs-China>. [Mei 2023].